



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR YANG TERDAMPAK COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

bekerjasama dengan

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2021**



LAPORAN AKHIR

KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN

SEKTOR-SEKTOR

YANG TERDAMPAK COVID-19

DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau
dan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tahun 2021



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

KATA PENGANTAR

Laporan akhir ini merupakan rangkaian sistem pelaporan yang harus diserahkan dalam rangka penyelesaian kegiatan **Strategi Pemulihan Sektor-Sektor Yang Terdampak Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau** yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tahun Anggaran 2021.

Secara keseluruhan laporan ini merupakan laporan yang didalamnya memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan kajian dari awal hingga akhir. Secara struktur, laporan ini dapat dikatakan telah mencakup keseluruhan tahapan yang telah dilakukan mulai dari penyusunan laporan awal, kajian teoritik dan empirik, pengumpulan data di lapangan hingga analisis terhadap data yang merupakan bagian penting dari penyusunan laporan akhir untuk menghasilkan kesimpulan kajian dan rekomendasi.

Dengan tersusunnya laporan akhir ini, maka rangkaian kegiatan kajian dinyatakan selesai dan telah berakhir. Semoga hasil yang didapat dari kajian ini memberikan implikasi positif terhadap pembangunan daerah khususnya dalam kebijakan pemulihan terhadap sektor-sektor yang terdampak pandemic Covid-19.

Tanjungpinang, Juli 2021

Tim Penyusun



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
DAFTAR ISI	2	
DAFTAR TABEL	6	
BAB I	PENDAHULUAN	8
1.1	Latar Belakang	8
1.2	Dasar Hukum	12
1.3	Tujuan	13
1.4	Keluaran/Hasil Yang Diharapkan	13
BAB II	TINJAUAN LITERATUR	14
2.1	Ekonomi Pandemi	14
2.2	Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian dan Pembangunan	19
2.3	Penilaian Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Daerah	23
2.4	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Sektor-Sektor	27
2.4.1	Studi SMERU terhadap Sektor Terdampak Dari Segi Ketenagakerjaan	27
2.4.2	Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	29
2.4.3	Sektor Perdagangan dan Pariwisata	30
2.5	Penanganan Dampak Covid-19	31
2.5.1	Pencegahan (Prevent)	32
2.5.2	Pendeteksian (Detect)	33
2.5.3	Tanggapan (Respond)	33
2.6	Langkah-langkah dan Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi	36



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

	2.7 Arah Program Pemulihan Ekonomi Daerah	42
BAB III	METODE PENELITIAN	46
	3.1 Pendekatan Penelitian	46
	3.2 Kerangka Operasional	47
	3.3 Tahapan Analisis	48
	3.4 Kalender Pelaksanaan Kegiatan	49
	3.5 Sistematika Penulisan	50
BAB IV	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR-SEKTOR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	52
	4.1 Kinerja Perekonomian	52
	4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	52
	4.1.2 Pendapatan Per Kapita	53
	4.1.3 Inflasi	54
	4.2 Dampak terhadap Sektor-Sektor dalam Ekonomi	55
	4.2.1 Sektor-Sektor Produksi dalam Pembentukan PDRB	56
	4.2.2 Sektor-Sektor Pengeluaran dalam Pembentukan PDRB	60
	4.2.3 Sektor-Sektor Strategis	65
	4.2.3.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	65
	4.2.3.2 Pariwisata	66
	4.3 Dampak Sosial	68
	4.3.1 Kesejahteraan Masyarakat	69
	4.3.2 Ketenagakerjaan	70
	4.3.3 Pendidikan	72



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

BAB V	STRATEGI PEMULIHAN	80
5.1	Penyebaran Pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau	80
5.2	Pemulihan : Dilema Aspek Kesehatan dan Non Kesehatan	86
5.3	Kerangka Skenario Pemulihan	91
5.4	Refocussing APBD Kepri 2020 dan Implikasi Pemulihan	101
5.4.1	Kebijakan Refocussing	101
5.4.2	Implikasi Pemulihan	104
5.5	Evaluasi dan Rekomendasi Strategi Pemulihan	114
BAB VI	P E N U T U P	121
6.1	Kesimpulan	121
6.2	Rekomendasi	123
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN:	
	Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi	
	Provinsi Kepulauan Riau	129



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1 SERANGAN PENGGANDA COVID-19 TERHADAP SIRKULASI PENDAPATAN	15
GAMBAR II.2 SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2020 (CSIS)	18
GAMBAR II.3 KETERPAPARAN SEKTOR TERDAMPAK COVID-19	21
GAMBAR II.4 TRANSMISI COVID-19 TERHADAP AGENDAA PEMBANGUNAN SDGs	22
GAMBAR II.5 PILAR EKONOMI DAN SOSIAL SDGs TERDAMPAK COVID-19	22
GAMBAR III.1 KERANGKA OPERASIONAL	48
GAMBAR V.1 SEBARAN PERTAMBAHAN KASUS COVID-19 DI KEPRI PER 31 MEI 2021	84
GAMBAR V.2 TRANSISI RESPON PANDEMIK KE PEMULIHAN	87
GAMBAR V.3 GAMBARAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR-SEKTOR	91
GAMBAR V.4 SKENARIO TRANSISI MENUJU FASE NEW NORMAL	95
GAMBAR V.5 SKENARIO TRANSMISI COVID-19 DI TINGKAT LOKAL	97



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

DAFTAR TABEL

TABEL I-1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KEPRI	10
TABEL II-1 SIMULASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PDB WILAYAH DI INDONESIA (KASUS KEPULAUAN RIAU)	23
TABEL II-2 ENAM SEKTOR KETENAGAKERJAAN TERDAMPAK COVID-19 (SMERU)	28
TABEL III-1 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN	49
TABEL IV-1 PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPRI DAN KABUPATEN/KOTA	53
TABEL IV-2 PERKEMBANGAN PDRB DI KEPRI	56
TABEL IV-3 GAMBARAN SEKTOR-SEKTOR PDRB YANG PALING TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI COVID-19	59
TABEL IV-4 PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN (PERSEN), 2017-2020	61
TABEL IV-5 PROFIL KEMISKINAN DI PROVINSI KEPRI	70
TABEL IV-6 KENAIKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	71
TABEL IV-7 INDIKATOR KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH DI KEPULAUAN RIAU	77
TABEL V-1 KATEGORI RESIKO BERDASARKAN STATUS ZONA	88
TABEL V-2 PERKEMBANGAN TINGKAT RESIKO COVID-19 DI KEPULAUAN RIAU (21 JULI 2021)	88
TABEL V-3 GAMBARAN PEMULIHAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI KEPULAUAN RIAU	89
TABEL V-4 RASIO OPERASIONAL SEKTOR-SEKTOR MENURUT FASE TRANSISI	95
TABEL V-5 SKENARIO KETERPAPARAN PADA FASILITAS KESEHATAN	97
TABEL V-6 PERKEMBANGAN TINGKAT RESIKO COVID-19 PROVINSI KEPRI	100
TABEL V-7 PENYESUAIAN TARGET PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	103
TABEL V-8 ALOKASI BELANJA REFOCUSING APBD KEPRI TA 2020	106
TABEL V-10 IDENTIFIKASI SEKTOR TERDAMPAK DAN STRATEGI PEMULIHAN	115



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK I.1	PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI	11
GRAFIK IV.1	PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015-2020 (RIBU RUPIAH)	54
GRAFIK IV.2	PERKEMBANGAN INFLASI DI KEPRI	54
GRAFIK IV.3	PROPORSI ANAK BERUSIA 15 TAHUN YANG	79
GRAFIK IV.4	PROPORSI ANAK BERUSIA 15 TAHUN YANG	79
GRAFIK V.1	PENYEBARAN COVID-19 DI KEPULAUAN RIAU SEPANJANG 2020	82
GRAFIK V.2	PENYEBARAN COVID-19 DI KEPULAUAN RIAU (PER 29 MEI 2021)	83
GRAFIK V.3	REALISASI REFOCUSING PEMERINTAH PROVINSI KEPRI, 2020	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merebaknya wabah penyakit menular Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) telah menimbulkan kekhawatiran global. Penyakit yang bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok pada hujung tahun 2019 ini kini telah mencapai hampir seluruh benua di muka bumi. Akhir Januari 2021, situs resmi <https://www.worldometers.info/> telah melansir jumlah kasus positif sebanyak 103,245,569 jiwa dengan angka kematian sebanyak 2,231,812 jiwa, akumulasi dari perkembangan kasus yang dilaporkan di 221 negara di dunia (data per 31 Januari 2021, pukul 23.58 WIB).

Berbagai negara mengupayakan langkah-langkah untuk menekan tingkat infeksi mulai dari karantina total (lockdown), pengujian massal (testing), melarang keramaian dan anjuran menjaga jarak (social/physical distancing) hingga kewajiban menggunakan masker (penutup wajah) bagi setiap aktivitas di luar rumah. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah menjadikan PSBB sebagai upaya maksimal dalam penanggulangan Bencana Nasional Covid-19 seiring pertambahan jumlah kasus positif dan lonjakan angka kematian yang signifikan. Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau sempat saat ini terus melaporkan perkembangan kenaikan kasus positif di Kepri. Per 19 Januari 2021, positif Covid-19 telah bertambah menjadi 7.748 kasus dengan tingkat kematian sebanyak 192 kasus positif dan 6.789 kasus sembuh.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pandemi Covid-19 tidak hanya krisis pada bidang kesehatan, namun juga telah berdampak pada banyak aktivitas masyarakat serta terjadinya pelambatan ekonomi dan pembangunan, serta belum diketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Tantangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau ini semakin berat pasca pandemi Covid 19. Hal ini dapat dilihat dari semakin merosotnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Pada Triwulan III pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau -5,81%, lebih buruk dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang -3,49%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau paling terburuk di Pulau Sumatera yang -2,22% (Aceh - 0,11 %, Sumut - 2,60 %, Sumbar – 2,87 %, Riau – 1,67 %, Jambi – 0,79 %, Bengkulu -0,09 %, Sumsel – 1,40 %, Babel – 4,38%, Lampung – 2,41 %) dan sepanjang sejarah 18 tahun berdiri Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan lain adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin bertambah. Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 131.966 orang (5,92 %), jumlah ini bertambah sebanyak 4.208 orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yaitu sebesar 127.758 orang (5,80 %). Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi bertambah dampak dari pandemi covid 19 yaitu ekonomi yang menurun dan banyak terjadi PHK serta tenaga kerja yang dirumahkan.

Pertumbuhan ekonomi yang terpuruk dan jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah ini diperburuk dengan jumlah angka pengangguran yang juga meningkat. Pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,34 % atau 117.176 orang naik dibandingkan Februari 2020 yaitu 5,57% atau (59.170 orang), sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional hanya 7,07 %. Secara keseluruhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan ke 4 dari 34 Provinsi di Indonesia dan paling tertinggi di Pulau Sumatera (Aceh 6,59



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

%, Sumut 6,91 %, Sumbar 6,88 %, Riau 6,32 %, Jambi 5,13%, Bengkulu 4,07%, Sumsel 5,51 %, Babel 5,25% dan Lampung 4,67%).

Dalam setahun terakhir, kinerja perekonomian Kepri pada Triwulan IV 2020 telah mengalami kontraksi sebesar minus 4,46 persen akibat pandemik Covid-19. Namun, nilai kontraksi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan nilai kontraksi Triwulan III 2020 sebesar minus 5,81 persen. Situasi ini dapat dilihat sebagai indikasi harapan adanya pemulihan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2020 dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang mencapai sebesar positif 4,53 persen (Q – Q) melalui kontribusi pendorong dari sektor Kontruksi, Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian (BPS, 2020).

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2020 ditutup dengan angka minus 3,80 persen. Penurunan yang kontras jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang mencapai sebesar positif 4,84 persen memberikan gambaran bagaimana pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana dilansir oleh BPS Kepri, penurunan persentase pertumbuhan ini dipengaruhi oleh merosotnya sumbangsih sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel I-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri

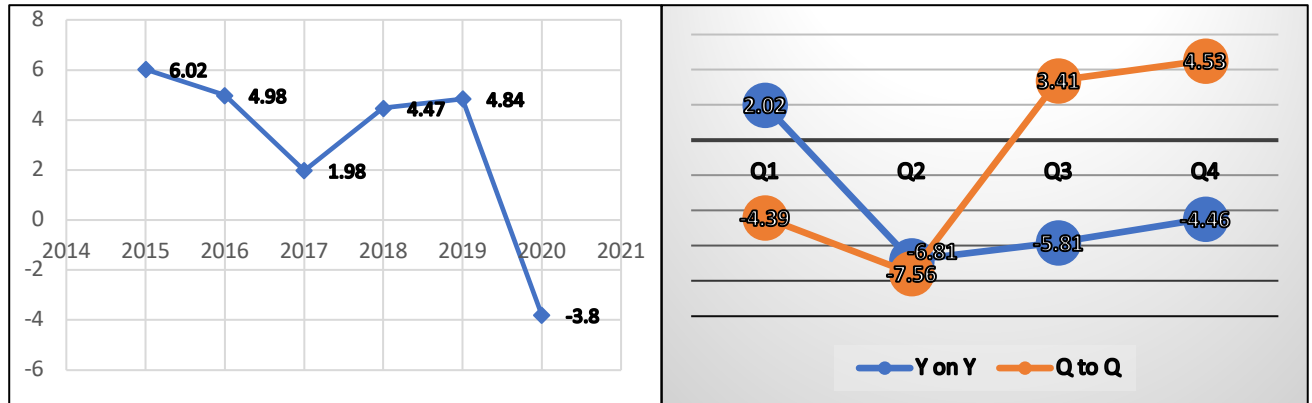
	TW III 2020	TW IV 2020	2019	2020
Y on Y	-5,81	-4,46		
Q to Q	3,41	4,53		
C to C			4,84	-3,80

Sumber : BPS Kepri, 2021



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Grafik I.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
(2015-2020; Q4 2020 Y on Y; Q42020 Q to Q)



Sumber : BPS, olahan.

Perkembangan kinerja pertumbuhan ekonomi Kepri secara umum didominasi oleh sektor pengolahan, konstruksi, pertambangan penggalan dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor yang terlihat pada pembentukan pangsa PDRB Kepulauan Riau tahun 2020. Sedangkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kepri banyak dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan minus sejumlah sektor sebagaimana tercermin pada kinerja pembentukan PDRB Tahunan dan PDRB Triwulan IV 2020. Di lain sisi, kontribusi sektor industri pengolahan masih tercatat yang positif di antara banyaknya sektor lain yang mulai menyentuh nilai minus baik pada periode Q to Q Tw IV 2020, periode Y on Y Tw IV 2020 maupun kinerja tahunan 2020 dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar positif 1,31; 2,41 dan 1,23 persen.

Berangkat dari pemaparan di atas berbagai sektor kehidupan masyarakat terdampak akibat pandemik covid 19, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadap sejauh mana dampak krisis pandemik Covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor di Provinsi Kepulauan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Riau. Penilaian ini perlu dilakukan agar pemerintah mampu mengidentifikasi secara cermat peta masalah, karakteristik, maupun *treatment* (penanganan) serta strategi pemulihan yang diperlukan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penelitian Strategi Pemulihan Sektor-Sektor Yang Terdampak Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- 9) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial; dan
- 10) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alamwabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian Strategi Pemulihan Sektor-Sektor Yang Terdampak Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- 1) Mengidentifikasi dan menjelaskan sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Merumuskan strategi pemulihan bagi sektor-sektor strategis dan potensial yang terdampak pandemi Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari ketidakpastian terhadap sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Keluaran/Hasil Yang Diharapkan

Kajian Strategi Pemulihan Sektor-Sektor Yang Terdampak Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau, ini diharapkan dapat memberikan hasil, yaitu:

- 1) Gambaran terhadap sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Strategi pemulihan sektor-sektor strategis dan potensial yang terdampak pandemi Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Rekomendasi kebijakan dalam mengatasi sektor-sektor yang terdampak pandemi covid 19.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Ekonomi Pandemi

Perekonomian dunia secara berulang telah mengalami periode kemakmuran maupun krisis baik dalam jangka pendek, sedang maupun jangka panjang (Haralambie, 2011). Dalam fenomena siklikal tersebut, krisis merupakan kenyataan yang paling dihindari akibat dampak yang dapat ditimbulkannya.

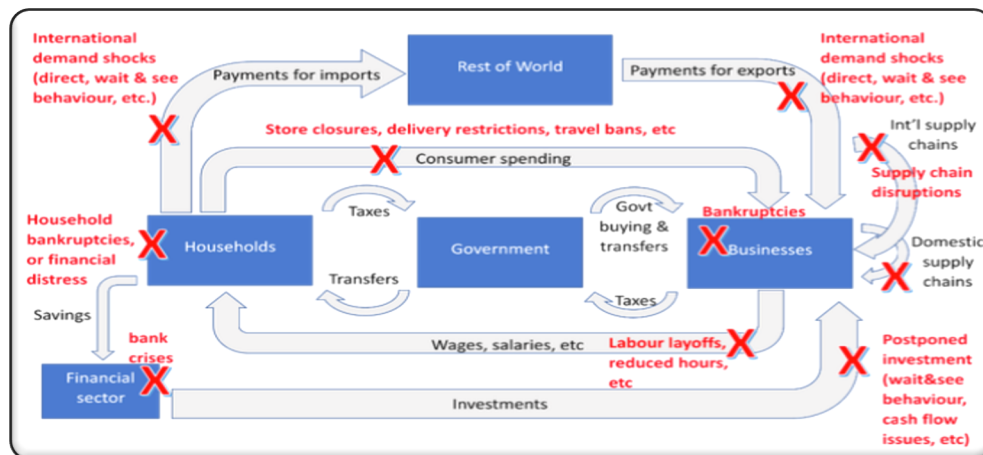
Setelah lebih dari satu dekade krisis 2008-2009, perekonomian dunia kembali menghadapi guncangan yang disebabkan oleh wabah pandemik Coronavirus 2019 yang berasal dari Tiongkok. Krisis ekonomi global yang disebabkan oleh wabah pandemik Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi terbesar sejak era Depresi Raya pada dekade 1930an (Hur & Jenuwine, 2020). Gambaran serupa turut dilontarkan oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Bahkan diperkuat oleh laporan *Global Economic Prospect* Bank Dunia pada Juni 2020 yang menurunkan tajuk : *Pandemic, Recession : The Global Economy in Crisis*. Bank Dunia lantas menyebut kontraksi ekonomi yang terjadi merupakan yang terburuk selama 80 tahun bahkan bisa lebih buruk dari resesi manapun selama 150 tahun jika mempertimbangkan jumlah negara yang menderita kerugian ekonomi.

Status pandemik global ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia akibat jumlah penularan yang meningkat semakin tajam yang disertai dengan jumlah kematian. Belum ditemukannya solusi ampuh mengatasi krisis kesehatan ini menyebabkan pemerintah dari hampir seluruh negara di dunia melakukan pembatasan fisik sehingga berdampak pada terhambatnya sirkulasi kegiatan ekonomi secara substansial.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Hampir keseluruhan dampak ekonomi berasal dari tindakan yang diambil oleh orang-orang dan pemerintah agar terhindar dari virus ini (Degye et.al, 2020). Adapun respon terhadap tindakan-tindakan ini berasal dari tiga sumber (Baldwin, 2020; Baldwin & Mauro, 2020). Pertama, pemerintah menetapkan larangan terhadap berbagai jenis kegiatan bisnis (seperti restoran, toko, dan lain-lain). Kedua, perusahaan dan organisasi mengambil tindakan pencegahan seperti penutupan bisnis, yang mengakibatkan kehilangan upah bagi para pekerja, khususnya dalam sektor ekonomi informal yang tidak memberlakukan cuti dibayar. Terakhir, individu-individu mengurangi perjalanan ke pasar, liburan, pergi keluar rumah dan berbagai aktivitas lain yang mempengaruhi sisi permintaan. Ringkasnya, industri kolaps, perdagangan terhenti, lapangan kerja hilang akibat orang-orang belum menemukan cara yang aman untuk berinteraksi seperti sedia kala.



Gambar II.1

Serangan Pengganda COVID-19 terhadap Sirkulasi Pendapatan

Sumber: <https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis> (Baldwin, 2020).

Terdapat banyak saluran yang dapat menyebabkan wabah penyakit menular dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi. Hal ini yang mendasari perhatian dari studi-studi dalam bidang ekonomi kesehatan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

(*health economics*) untuk menghitung biaya langsung maupun tidak langsung dari suatu penyakit (McKibbin & Fernando, 2020). Schoenbaum (1987) memberikan kontribusi awal tentang analisis dampak ekonomi dari influenza. Selanjutnya Meltzer et al. (1999) yang menguji dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat pandemik influenza di Amerika Serikat dan mengevaluasi sejumlah intervensi berbasis vaksin. Pada tingkat serangan bruto (yakni seberapa banyak orang yang terjangkiti virus dari sebanyak populasi) sebesar 15-35%, maka jumlah kematian akibat influenza adalah berkisar antara 89- 207 ribu dan perkiraan rata-rata dampak ekonominya bagi perekonomian AS adalah mencapai 73.1 milyar – 166.5 milyar dollar AS.

Bloom et al. (2005) menggunakan model peramalan Oxford untuk mengestimasi dampak potensial ekonomi dari pandemik yang diakibatkan oleh mutasi strain influenza avian. Studi mereka menganggap bahwa pandemik ringan dengan tingkat serangan 20% dan tingkat fatalitas-kasus sebesar 0.5 % dan kejutan konsumsi sebesar 3 %. Skenario-skenario yang memasukkan kontraksi permintaan selama dua kwartal hanya terjadi di Asia (menggabungkan efek sebesar 2.5 % PDB Asia atau sekitar 113.2 milyar dollar AS); kejutan jangka yang lebih panjang dengan wabak yang lebih lama dan kejutan lebih besar terhadap konsumsi dan ekspor menimbulkan kerugian sebanyak 6.5 % PDB (282.7 milyar dollar AS). Sedangkan PDB dunia berkurang sampai 0.6 %, perdagangan barang dan jasa menyusut sehingga 2.5 triliun dollar AS (14 %).

Ekonomi yang terbuka lebih lemah terhadap kejutan internasional. Studi dari Kantor Anggaran Kongres AS pada tahun 2005 menguji dua skenario pandemik influenza. Skenario dengan tingkat serangan 20% dan tingkat fatalitas kasus 0.1% dan skenario yang lebih berat dengan tingkat serangan 30% dan tingkat fatalitas kasus 2.5%. Studi tersebut (*A Potential Influenza Pandemic: Possible Macroeconomic Effects and Policy Issues*,



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

2005) menemukan bahwa kontraksi PDB 1,5 % untuk skenario ringan dan 5 % untuk skenario yang berat.

McKibbin & Sidorenko (2006) pula menggunakan model yang mengeksplorasi empat skenario influenza pandemik yang berbeda. Di antaranya skenario ringan yang diserupakan dengan pandemik Flu Hongkong 1968-1969, skenario moderat dengan flu Asia 1957, skenario berat dengan flu Spanyol 1918-1919 (estimasi lebih rendah tingkat fatalitas kasus) dan skenario ultra yang serupa dengan Flu Spanyol 1918-1919 namun dengan estimasi fatalitas kasus yang menengah ke atas. Studi mereka menemukan bahwa biaya untuk menyelamatkan perekonomian global antara 300 juta dollar AS sampai 4.4 triliun dollar AS dari skenario-skenario yang dipertimbangkan.

Dengan jangkauan dampak potensialnya, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani telah mengungkapkan dua skenario pertumbuhan ekonomi yaitu Skenario Berat dan Sangat Berat. Sebagaimana dilansir dari media online internasional CNBC¹, dalam deskripsi Skenario Berat ekonomi diprediksi bisa tumbuh positif 2,3 % dengan pertambahan jumlah orang miskin sebanyak 1,16 juta orang dari total terakhir menurut BPS sebanyak 24,79 juta orang per September 2019. Jumlah pengangguran bertambah sebanyak 2, 92 juta orang dari perhitungan total terakhir versi BPS sebanyak 6,88 juta orang per Februari 2020.

Sedangkan menurut Skenario Sangat Berat, ekonomi hanya bisa tumbuh negatif 0,4 %. Jumlah orang miskin bertambah sebanyak 3,87 juta orang, dari total perhitungan terakhir sebanyak 24,79 juta orang per

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200507121420-4-156911/ini-skenario-sangat-berat-ekonomi-ri-2020-dari-sri-mulyani>, dimuat 7 Mei 2020.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

September 2019 (9,22 % dari jumlah penduduk). Jumlah pengangguran bertambah sebanyak 5,23 juta orang dari total perhitungan terakhir menurut BPS sebanyak 6,88 juta orang per Februari 2020.

	Pesimis	Status Quo	Optimis
GLOBAL	- Penurunan pertumbuhan ekonomi di 5 negara/kawasan (US, Tiongkok, Jepang, India, EU) - Tren Penurunan indeks harga komoditas dan volume perdagangan - Kebijakan populis masih marak (proteksionisme dan perang dagang) - Pandemi COVID-19 tidak tertangani secara serius (penyebaran virus meningkat) - Situasi politik dan keamanan tidak stabil	- Stagnasi pertumbuhan ekonomi di 5 negara/kawasan (US, Tiongkok, Jepang, India, EU) - Stagnasi indeks harga komoditas dan volume perdagangan - Kebijakan populis masih ada (proteksionisme dan perang dagang) - Pandemi COVID-19 kurang tertangani secara serius (penyebaran virus stagnan) - Situasi politik dan keamanan tidak menentu	- Peningkatan pertumbuhan ekonomi di 5 negara/kawasan (US, Tiongkok, Jepang, India, EU) - Tren peningkatan indeks harga komoditas dan volume perdagangan - Kebijakan populis berkurang (proteksionisme dan perang dagang) - Pandemi COVID-19 tertangani secara serius (penyebaran virus menurun) - Situasi politik dan keamanan stabil
DOMESTIK	- Reformasi struktural tidak berjalan (daya saing dan produktivitas, industrialisasi, ekonomi digital, akses pembiayaan) - Reformasi birokrasi tidak berjalan (kasus suap, korupsi, inefisiensi birokrasi, sinergi dan koordinasi lemah) - Kinerja buruk kebijakan fiskal (budget deficit, tax ratio to GDP) dan moneter (inflasi, nilai tukar, suku bunga) - Turunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, iklim investasi buruk, kontraksi industri manufaktur - Penanganan COVID-19 buruk dan kurangnya transparansi	- Reformasi struktural berjalan kurang optimal (daya saing dan produktivitas, industrialisasi, ekonomi digital, akses pembiayaan) - Reformasi birokrasi berjalan kurang optimal (kasus suap, korupsi, inefisiensi birokrasi, sinergi dan koordinasi lemah) - Kinerja kurang optimal kebijakan fiskal (budget deficit, tax ratio to GDP) dan moneter (inflasi, nilai tukar, suku bunga) - Stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, iklim investasi buruk, kontraksi industri manufaktur - Penanganan COVID-19 kurang baik dan kurang transparan	- Reformasi struktural berjalan optimal (daya saing dan produktivitas, industrialisasi, ekonomi digital, akses pembiayaan) - Reformasi birokrasi berjalan optimal (kasus suap, korupsi, inefisiensi birokrasi, sinergi dan koordinasi lemah) - Kinerja optimal kebijakan fiskal (budget deficit, tax ratio to GDP) dan moneter (inflasi, nilai tukar, suku bunga) - Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, iklim investasi buruk, kontraksi industri manufaktur - Penanganan COVID-19 baik dan transparan
	Pertumbuhan Ekonomi (0-1,99%)	Pertumbuhan Ekonomi (2-3,99%)	Pertumbuhan Ekonomi (4-4,99%)

Gambar II.2
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 (CSIS)



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Secara garis besar, pemetaan potensi dampak pandemik pada perekonomian global dan domestik Indonesia turut dirilis oleh Departemen Ekonomi CSIS (Central for Strategic and International Studies) yang bertajuk “Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020” (Damuri & Hirawan, 2020). Rilis tersebut dengan memperhatikan keterangan yang kredibel dari berbagai sumber.

2.2 Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian dan Pembangunan

Kontraksi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 tidak hanya diakibatkan oleh dampak langsung penurunan kegiatan produksi karena terjadinya gangguan rantai pasok bahan baku dan faktor produksi, namun juga dampak tidak langsung dari sikap menunggu pelaku usaha yang dipicu oleh tingginya ketidakpastian. Sebagai negara yang menerapkan ekonomi terbuka, perekonomian Indonesia juga terkena dampak COVID-19. Kepanikan di pasar keuangan global telah menyebabkan terjadinya pembalikan modal dan peningkatan tekanan pada pasar mata uang, pasar modal dan pasar obligasi di Indonesia. Dalam periode Januari - April 2020, telah terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia baik di pasar saham, pasar SBN maupun SBI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami pelemahan yang tajam terkoreksi hampir 28 persen serta nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi sekitar 9 persen pada akhir April 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 persen di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 persen pada kuartal pertama 2020. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan pembatasan dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020. Pemerintah harus menyiapkan skenario terburuk dan bahkan ekonomi bisa berada di angka -0,4% mengingat mengawali tahun ini dengan angka



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

yang rendah.⁹ Salah satu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi anjlok adalah turunnya konsumsi rumah tangga karena adanya pelaksanaan pembatasan/PSBB di beberapa daerah yang semula hanya dilakukan di wilayah Jabodetabek, kini penerapan tersebut diperluas hingga ke beberapa provinsi dan kabupaten/kota lain.

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat yang disertai langkah penanganan COVID-19 yang luar biasa sehingga membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan maupun sisi penawaran, yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi.

Beberapa sektor terdampak langsung dari wabah ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor perdagangan ritel dan sektor informal yang didominasi oleh UMKM juga terdampak signifikan dari disrupsi ekonomi akibat COVID-19 dan perlu mendapat perhatian ekstra mengingat tingginya serapan tenaga kerja yang mencapai 24 juta atau sekitar 18,9 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sektor strategis lainnya yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat penyebaran COVID-19 adalah industri pengolahan yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,06 persen pada triwulan I 2020.¹⁰ Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam menggerus profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Perkembangan pandemi yang semakin meluas secara global tidak hanya memengaruhi produk industri tetapi juga permintaan dan penawaran hasil industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Di sisi lain, kondisi masyarakat yang fokus pada kebutuhan pokok dan alat



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

kesehatan mengurangi minat konsumsi atas barang-barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan tergolong mewah. Beberapa kelompok industri yang terdampak cukup dalam antara lain, industri garmen, alas kaki, otomotif, mesin, dan elektronik. Secara umum, tingginya guncangan terhadap sektor produksi, khususnya dari sisi pasokan berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan permintaan agregat yang dapat mengakibatkan resesi ekonomi.

Secara umum, analisis eksposur dampak pandemi terhadap berbagai sektor diilustrasikan pada gambar berikut. Di samping sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, aktivitas pendukung lainnya seperti jasa transportasi, pembiayaan kendaraan bermotor, dan jasa penerbangan juga terdampak signifikan akibat meluasnya wabah tersebut.

Eksposur Tinggi	• Perdagangan besar dan eceran, • reparasi mobil dan sepeda motor • Penyediaan akomodasi makan dan minum • Transportasi dan pergudangan	• Industri pengolahan • Jasa penerbangan • Jasa pembiayaan kredit motor
Eksposur Moderat	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan • Jasa keuangan dan asuransi • Pertambangan dan penggalan	• Informasi dan komunikasi • Jasa perusahaan • Pembiayaan KPR
Eksposur Rendah	• Konstruksi • Real Estate • Pengadaan Listrik dan Gas • Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.	• Jasa Lainnya • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur ulang

Gambar II.3

Keterpaparan Sektor Terdampak COVID-19

Sumber : Data Olahan BPS , sebagaimana dikutip dari Kemendagri (2020)



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Perlambatan perekonomian akibat pandemik Covid 19 juga dipastikan berimbas pada kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas memprediksi dampak dari koreksi minus pertumbuhan yang disertai dengan kenaikan kemiskinan dan pengangguran beresiko terhadap pencapaian agenda pembangunan terutama pilar pembangunan ekonomi dan sosial SDGs (*Sustainable Development Goals*). Relevansi tujuan pembangunan SDGs yang berkaitan dengan pilar pembangunan ekonomi di antaranya mencakup tujuan ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau, tujuan ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur dan tujuan ke-10 pengurangan kesenjangan. Sedangkan tekanan pandemik terhadap pilar pembangunan sosial dari tujuan pembangunan SDGs mencakup pencapaian tujuan ke-1 hingga ke-5 di antaranya pengurangan kemiskinan, pengurangan kelaparan, darurat kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender.



Gambar II.4
Transmisi COVID-19 Terhadap Agenda Pembangunan SDGs

☐ Kemiskinan ☐ Kelaparan ☐ Kesehatan ☐ Pendidikan ☐ Kesetaraan Gender	☐ Energi Bersih dan Terjangkau ☐ Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ☐ Industri, Inovasi dan Infrastruktur ☐ Pengurangan kesenjangan
--	--

Gambar II.5
Pilar Ekonomi dan Sosial SDGs Terdampak COVID-19



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

2.3 Penilaian Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Daerah

Modjo (2020) mengutip simulasi bagaimana dampak Covid-19 terhadap seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Simulasi oleh Arief Anshory Yusuf (2020) ini digunakan untuk menunjukkan tahapan dampak Covid 19 yang terjadi melalui tiga transmisi (saluran) yaitu melalui perubahan pada tingkat perdagangan eksternal provinsi, perubahan aktivitas pariwisata dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Melalui simulasi tersebut, Arief menunjukkan terdapat penurunan tingkat pertumbuhan sebesar rata-rata 5,0% dari 2019 secara nasional. Dengan kata lain, angka pertumbuhan ekonomi pada 2020 diramal akan turun menjadi hanya nol persen dari basis 5,02% pertumbuhan pada 2019.

Simulasi yang sama menunjukkan gradasi di berbagai provinsi. Penurunan terbesar diperkirakan akan terjadi pada DKI, yang diperkirakan PDRB- nya (Produk Domestik Regional Bruto) akan merosot hingga negatif 7.5%. Atau dengan basis pertumbuhan pada 2019 sebesar 5,9%, ekonomi DKI diperkirakan akan tumbuh negatif 1.6% pada 2020. Sementara dampak terlemah akan terjadi di provinsi Papua, yang perekonomiannya hanya akan turun sebesar -1,2%, dari -15,72% pada 2019 menjadi -16.92% pada 2020.

Tabel II-1
Simulasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PDB Wilayah di Indonesia (Kasus Kepulauan Riau)

Daerah	Dampak Keseluruhan	Pariwisata	Perdagangan Eksternal	Pembatasan Sosial
Kepulauan Riau	-5,0	-0,4	-0,2	-4,5

Sumber : Yusuf, Anshory (2020)

Simulasi tersebut juga menunjukkan akan terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar rata-rata 1,5% secara nasional, atau kenaikan hampir 3,9 juta penduduk miskin. Peningkatan terbesar akan dialami



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

oleh provinsi Jawa Barat, yang penduduk miskinnya akan meningkat sebesar 1,9% atau 943 ribu orang, sementara kenaikan terendah akan terjadi di provinsi Kalimantan Utara, yang penduduk miskinnya naik 0.5% atau sekitar 3400 orang.

Kontributor utama dari penurunan hampir secara seragam perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia adalah dilakukannya pembatasan sosial berskala besar secara serentak, yang memang secara faktual terjadi terutama dalam hal mobilitas penduduk untuk bekerja. Sementara, alokasi stimulus fiskal sebesar Rp.405 triliun (+/- 2.5% PDB) dalam bentuk bantuan sosial (Rp.110 triliun), anggaran kesehatan (Rp.75 triliun), insentif industri (Rp.70 triliun), dan pemulihan ekonomi (Rp.150 triliun) hanya berdampak minimal untuk menahan laju penurunan pertumbuhan, dengan kontribusinya pada peningkatan pertumbuhan hanya sebesar 0.15%.

Menurut Modjo (2020), terdapat tiga aspek yang dapat dipetik sebagai pelajaran dari pandemi Covid 19. Pertama, pandemi Covid-19 memiliki dampak ekonomi dan sosial terbesar pada provinsi yang memiliki banyak daerah urban yang padat penduduk. Dari sebaran data tergambar bahwa proyeksi penurunan PDRB terbesar terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bali dan Sulawesi Selatan, yang merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki banyak daerah urban.

Kedua, kontributor utama penurunan PDRB pada berbagai provinsi yang ada di Indonesia adalah masifnya terjadi social distancing baik secara formal melalui kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau yang dilakukan secara informal, seperti mereka yang melakukan kerja dan belajar secara mandiri dari rumah, atau setengah terpaksa karena menganggur akibat terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau menutup usahanya.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Ketiga, penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagian besar diakibatkan pembatasan sosial ini tidak bisa serta merta dipulihkan oleh geyuran stimulus fiskal, yang tentunya juga memiliki banyak keterbatasan baik dari segi sumber maupun instrumen yang bisa diambil. Suntikan stimulus sebesar Rp.405,1 triliun yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang kurang signifikan untuk menahan laju penurunan pertumbuhan.

Sedangkan, Sakri (2020) malansir analisis deskriptif mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian provinsi di Indonesia didasarkan pada model sederhana dengan beberapa asumsi yang menyertainya. Model sederhana ini mengandaikan bahwa tingkat keparahan dampak COVID-19 terhadap ekonomi provinsi (I) ditentukan oleh empat faktor yang simultan bekerja di provinsi tersebut yakni tingkat pandemik COVID-19 di provinsi tersebut (C), faktor risiko bencana alamnya (D), faktor permasalahan ekonominya (E), kemudian beban tekanan fiskal provinsi tersebut (F). Semakin besar C, D, E, dan F, akan semakin besar pula I.

Tingkat pandemi COVID-19 (C) diukur dengan modifikasi dari variabel yang telah digunakan, yakni rasio kasus sembuh terhadap rasio kasus terinfeksi (variabel r). Modifikasinya adalah r dihitung pada tingkat provinsi bukan pada kluster pulau. Selain itu, karena adanya variasi nilai r dari waktu ke waktu, maka nilai r yang digunakan adalah r rata-rata dari dua bulan (sepanjang Mei dan Juni) atau 61 hari pengamatan terakhir. Memilih satu titik observasi saja tidak tepat karena tidak mencerminkan realitas r yang dinamis. Adapun periode dua bulan terakhir pengamatan dipilih karena pada awal pandemi diasumsikan sistem pelayanan kesehatan belum siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 sedangkan pada dua bulan terakhir sudah bekerja semestinya sehingga nilai r pada periode tersebut relatif mencerminkan kemampuan nyata sistem kesehatan. Modifikasi terakhir adalah mengubah r menjadi



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

1-r untuk memudahkan interpretasi, yakni semakin besar nilai 1-r maka semakin besar pula tingkat pandemik (C) yang dirasakan suatu provinsi. Semakin tinggi C semakin tinggi pula I (dampak ekonomi COVID-19 di suatu provinsi).

Faktor risiko bencana alam (D) merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap kemampuan suatu wilayah terhadap tekanan. Bayangkan jika suatu daerah mengalami bencana alam pada saat yang bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini, maka tekanan akan menjadi berlipat ganda.

Dengan demikian dalam model ini, semakin suatu daerah memiliki faktor risiko bencana yang tinggi, maka semakin tinggi pula dampak ekonomi yang akan dialaminya. Sedangkan faktor permasalahan ekonomi (E) meliputi 2 variabel yakni tingkat kemiskinan (p) dan pengangguran (u). Semakin tinggi tingkat kemiskinan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 maka akan semakin berat dampak ekonomi COVID-19 di provinsi tersebut. Karena secara bersamaan jumlah penduduk miskin akan bertambah dengan adanya miskin baru. Logika yang sama berlaku untuk variabel angka pengangguran (u).

Faktor tekanan fiskal (F) diukur dengan PADPC (pendapatan asli daerah per kapita) yang dalam tulisan ini didefinisikan sebagai total PAD dari tiga level pemerintahan yakni provinsi, kabupaten, dan desa (PADes/pendapatan asli desa) kemudian dibagi dengan jumlah penduduk provinsi. PAD per kapita menunjukkan kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya anggarannya untuk mengatasi COVID-19, misalnya untuk memberikan bantuan keuangan dan subsidi kepada masyarakat. PADPC dipilih sebagai indikator karena ia menunjukkan kemampuan relatif keuangan masing-masing daerah independen terhadap transfer keuangan dari pusat.

Berbeda dengan variabel lain yang telah dibahas sebelumnya, semakin besar nilai variabel PADPC maka semakin bagus untuk daerah



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

untuk mengurangi beban ekonomi akibat COVID-19. Oleh karena itu, untuk variabel ini, digunakan ukuran $1/\log$ (PADPC) sehingga karakteristik nilainya sama dengan variabel lain yakni semakin besar $1/\log$ (PADPC) semakin berat tekanan fiskal dan pada gilirannya semakin berat dampak ekonomi akibat COVID-19 di daerah tersebut (I).

2.4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Sektor-Sektor

2.4.1 Studi SMERU terhadap Sektor Terdampak Dari Segi Ketenagakerjaan

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terganggunya kegiatan operasional perusahaan yang terdampak krisis ini. Terdapat enam lapangan usaha yang berpotensi terdampak cukup parah, yaitu penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan jasa lainnya. Berdasarkan data Sakernas dan Susenas 2019, enam lapangan usaha tersebut didominasi oleh tenaga kerja dari kelompok ekonomi menengah yang mayoritas merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Jika dilihat dari status pekerjaannya, sektor penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; serta transportasi dan pergudangan didominasi oleh pekerja informal. Selain itu, krisis ini juga berpotensi menekan tingkat partisipasi kerja perempuan, khususnya di sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Tabel II-2
Enam Sektor Ketenagakerjaan Terdampak Covid-19 (SMERU)

Sektor	Total Tenaga Kerja (dalam juta orang)	Persentase Tenaga Kerja Formal-Informal (F-I)	
		F	I
Akomodasi Makan Minum	8,5	31,8	68,2
Perdagangan	24,4	33,5	66,5
Transportasi & Pergudangan	5,6	40,7	59,3
Konstruksi	8,5	51,4	48,6
Jasa Lainnya	6,4	55,4	45,6
Industri Pengolahan	19,1	64,8	35,2

Sumber : SMERU

Dalam rilis CSIS (13 April 2020) tentang “Tantangan dan Adaptasi Lapangan Kerja di Era Pandemi COVID-19” , meningkatnya angka pengangguran di masa pandemik Covid 19 dipicu oleh kebijakan PHK dan perumahan pekerja. Sektor-sektor yang terdampak itu sebagian besar merupakan sektor dengan *labor intensive* (padat tenaga kerja) yang sukar dalam penerapan #kerjadarirumah serta sektor yang memiliki rantai pasokan global seperti sektor industri tekstil, manufaktur, ritel, akomodasi, kuliner, penerbangan/travel, hingga ritel. Seiring itu, sebagian besar tenaga kerja di wilayah episentrum bekerja di sektor-sektor berisiko ini.

Dengan adanya ketidakpastian masa pandemik COVID-19, analisis CSIS memandang perlunya adaptasi di pasar tenaga kerja dengan mempertimbangkan tiga hal: (1) banyaknya jumlah pencari kerja, (2) risiko sulitnya kebutuhan dasar (sandang, pangan papan), dan (3) pekerjaan dengan interaksi fisik yang minim antar-manusia. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu mengembangkan skema-skema kebijakan yang dapat mendorong fasilitasi dan insentif agar pengembangan keterampilan tenaga kerja dapat diakomodasi guna memenuhi



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Pemanfaatan program kartu prakerja dapat dijadikan sebagai kanal untuk menyalurkan hal tersebut, dapat melalui perluasan keterampilan seperti *urban farming*, *hydroponic*, hingga *aquaponic* yang intinya dapat mengakselerasi *decentralized economy* setidaknya pada skala desa/kelurahan.

2.4.2 Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dikarenakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain (1) Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) (3) Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%) (5) Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar atau sebesar 60,42% (Thaha, 2020).

Tidak terhindarnya sektor UMKM dari paparan pandemik Covid 19 tidak dapat dielakkan dengan munculnya gangguan yang memperlambat pertumbuhan sektor UMKM. Bahtiar & Saragih (2020) mensinyalir hal yang menyebabkan perlambatan pada sektor UMKM akibat pandemi Covid-19 adalah penyerapan produk, ketersediaan bahan baku, dan proses distribusi. Hal ini tidak lain dipicu oleh lesunya sektor pariwisata yang kemudian berdampak pada UMKM mengingat penyerapan produk UMKM oleh sektor pariwisata yang cukup signifikan (Amri, 2020).



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Keterangan ini sejalan dengan temuan yang dirilis oleh baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi dan UMKM dimana pandemi Covid-19 telah berimplikasi negatif melalui penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan sehingga setidaknya eksistensi sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan terjadinya sebanyak 56% penurunan penjualan, 22% masalah pembiayaan, 15% masalah distribusi barang, 4% masalah dalam aksesibilitas bahan baku barang (Pakpahan, 2020).

2.4.3 Sektor Perdagangan dan Pariwisata

Pariwisata di Indonesia sebagai sektor ekonomi yang penting dan strategis karena mengandung efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar dalam perekonomian yang dikaitkan dengan sektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, hingga industri UMKM. Oleh karena itu, penurunan kinerja sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 sejak awal sudah dapat diprediksi. Hal ini tidak lain karena pandemi Covid-19 telah menghambat mobilitas manusia secara substansial. Terbukti dengan tingkat kunjungan wisatawan periode Januari-November 2020 yang hanya berjumlah sebanyak 3,89 juta kunjungan atau mengalami penurunan drastis sebanyak 73,60% apabila dibandingkan dengan tingkat kunjungan pada periode yang sama di tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 14,73 juta.

Penurunan drastis sektor perdagangan dan pariwisata juga dapat dimaklumi dengan kenyataan Cina sebagai mitra dagang utama Indonesia sekaligus episentrum (sumber penyebaran) wabah Covid-19 yang pertama kali di dunia (Budiyanti, 2020). Ditambah kenyataan bahwa sejumlah



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

destinasi wisata utama Indonesia seperti Bali memiliki ketergantungan dengan kunjungan wisatawan dari Cina.²

Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya (Sugihamretha, 2020).

2.5 Penanganan Dampak Covid-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.

Studi Kajian Pembelajaran Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh para ahli di bawah Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya

² Pernyataan Pemerhati Pariwisata Herry Anglign yang dimuat dalam voaindonesia.com, 12 Februari 2020.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

untuk mempetakan penanganan Covid-19 ke dalam dua kelompok sasaran yaitu bidang kesehatan dan bidang non-kesehatan.

Dalam bidang kesehatan, para ahli ini merekomendasikan 15 butir pembelajaran penanganan Covid-19 yang saling terhubung satu-sama lain dengan mengacu pada kerangka konsep WHO yang terdiri dari *Prevent* (mencegah), *detect* (mendeteksi), dan *respond* (bertindak):

2.5.1 Pencegahan (*Prevent*)

1. Pelatihan komunikasi publik tentang risiko pandemi termasuk regulasi dan pembentukan pusat informasi yang didukung pemerintah dan swasta, serta melibatkan peran masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dari tingkat nasional hingga tingkat RT/RW atau desa.
2. Penguatan kapasitas dalam komunikasi risiko bagi para pejabat pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penyampaian informasi secara tegas, akurat, dan konsisten.
3. Penguatan peran media massa (digital dan konvensional) dalam penyebaran informasi akurat di masyarakat, dan peningkatan kemampuan membuat *counter* informasi terhadap infodemik (*hoax*).
4. Menjamin akses publik secara maksimal atas informasi komprehensif dan terpercaya bersumber dari pemerintah dengan pemanfaatan teknologi pemberitaan (digital dan konvensional).
5. Penguatan koordinasi krisis yang melibatkan berbagai modal sosial mulai dari level mikro seperti di tingkat RT/RW, hingga masyarakat luas dengan penguatan fokus ke penanganan pandemi secara simultan (tanpa egosentris) kementerian/lembaga/badan pemerintahan terkait.
6. Peningkatan kapasitas vaksinasi COVID-19 dengan penerbitan kebijakan imunisasi yang memastikan semua



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

kelompok umur memiliki akses penuh ke berbagai jenis vaksin agar mempercepat tercapainya *herd immunity* dan dipadukan dengan intervensi kesehatan lainnya, serta penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana vaksinasi yang memadai.

2.5.2 Pendeteksian (*Detect*)

1. Penguatan sistem surveilans yang terintegrasi, melaporkan hasil tes lab yang interoperable dan real-time, terkoordinasi antardaerah dan antarpusat- daerah, secara lintas sektor serta bersifat mandatory.
7. Peningkatan kapasitas laboratorium, baik kuantitas (SDM) maupun kualitas, kecukupan logistik, dan sarana prasarana yang memadai, serta pengembangan mekanisme pengawasannya.
8. Penguatan sistem pencatatan testing, tracing, treatment (3T) untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cepat dan manajemen data dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

2.5.3 Tanggapan (*Respond*)

1. Koordinasi lintas sektor dan komunikasi risiko diperkuat dan dilakukan oleh berbagai pihak karena merupakan modal utama manajemen respons yang efektif.
2. Pelatihan SDM dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukupi tanpa mendiskriminasi fasilitas kesehatan swasta di tingkat primer (termasuk pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus).
3. Pengembangan early warning system sebagai alat bantu pengambilan keputusan pengadaan dan pendistribusian kefarmasian termasuk vaksin dan alat kesehatan secara cepat, namun tetap akuntabel, dan diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

4. Membangun jejaring penghubung produsen, donatur, dan pengguna (masyarakat), serta mendorong filantropi lokal untuk membantu penyediaan suplai medis dan alat kesehatan.
5. Memastikan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk dalam pengelolaan limbah medis, penyediaan alokasi dana dan pelatihan bagi pengelola limbah medis.
6. Memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dengan penerapan protokol kesehatan, merencanakan monitoring 3T dan sistem rujukan yang efektif, oleh fasilitas kesehatan publik dan swasta.

Selanjutnya, para ahli ini pula merumuskan 10 butir pembelajaran utama penanganan Covid-19 dalam bidang non-kesehatan yang saling terkait satu sama lain dan juga terkait erat dengan pembelajaran dari sektor kesehatan:

- 1) Peningkatan upaya percepatan produksi penyediaan vaksin dan APD, inovasi dan pengembangan alat kesehatan dan sarana deteksi COVID-19 oleh berbagai lembaga di dalam negeri melalui dukungan sumberdaya dan percepatan proses pengadaan bahan baku, produksi masal, dan pemasaran.
- 2) Penyelarasan kebijakan pengaturan kegiatan ekonomi dan strategi pemulihan ekonomi agar sejalan dengan upaya pencegahan COVID-19. Komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penerapan protokol kesehatan perlu ditingkatkan guna pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dengan didukung aturan dan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Penyesuaian sistem pendidikan agar dapat meminimalkan interaksi fisik guna pencegahan penyebaran COVID-19, disertai dengan upaya komprehensif dan afirmasi untuk *mencegah learning loss* dan melebarnya kesenjangan capaian pendidikan.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- 4) Perkuatan kolaborasi dengan lembaga dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan pencegahan COVID-19 dan memberikan arahan serta keteladanan dalam pelaksanaan tata cara peribadatan dan pelaksanaan kehidupan beragama yang mendukung pencegahan penyebaran COVID-19.
- 5) Peningkatan kerjasama antar kementerian dan dengan lembaga keagamaan untuk menyisipkan protokol kesehatan dalam kegiatan keagamaan, seperti fatwa dan pedoman peribadatan/penyelenggaraan kegiatan terkait kehidupan beragama yang menerapkan kegiatan utama pencegahan penyebaran COVID-19.
- 6) Peningkatan kerjasama pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan) dan masyarakat untuk menggali dan mengembangkan budaya, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional dapat mendukung upaya pengendalian pandemi COVID-19.
- 7) Peningkatan literasi kesehatan melalui internalisasi promotif dan preventif dalam ekosistem pendidikan, serta peningkatan budaya literasi masyarakat secara umum.
- 8) Menjamin penyesuaian tata cara pelayanan perlindungan perempuan, anak dan pemuda secara komprehensif, termasuk perubahan peraturan dan panduan, dukungan pendanaan, bantuan hukum, penyesuaian kapasitas sumberdaya manusia, dan dukungan teknologi dan peralatan.
- 9) Perluasan cakupan dan peningkatan keakuratan data perlindungan sosial, agar lebih transparan, mudah diadopsi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan sesuai dengan perkembangan dampak pandemi COVID-19 di berbagai sektor.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

10) Pengembangan sistem perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial) yang adaptif, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai konteks kebencanaan, dengan koordinasi antarlembaga yang lebih baik, mekanisme protokol kedaruratan yang jelas, dan jangkauan pelayanan yang lebih inklusif, khususnya untuk kelompok rentan dan tertinggal.

Keseluruhan butir-butir pembelajaran penanganan Covid-19 baik dalam bidang kesehatan maupun non kesehatan dirangkum ke dalam beberapa lingkup cakupan studi, terdiri dari:

A. Bidang Kesehatan:

- Kapasitas Keamanan Kesehatan;
- Kapasitas Pelayanan Kesehatan;
- Upaya Promotif dan Preventif; dan
- Manajemen Respons.

B. Bidang Non-Kesehatan:

- Pemanfaatan Inovasi Teknologi Berbasis Litbang;
- Pengelolaan Ekonomi;
- Penyelenggaraan Pendidikan;
- Kehidupan Beragama di Masa Pandemi;
- Peran Tokoh dan Organisasi Keagamaan;
- Kehidupan Sosial Budaya;
- Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pemuda; dan
- Sistem dan Mekanisme Perlindungan Sosial.

2.6 Langkah-langkah dan Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi

Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan dan program jaring pengaman sosial, pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah program kebijakan ekonomi, antara lain, *refocusing* dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, pemerintah mengatur percepatan pelaksanaan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

refocusing, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Fokus utama kebijakan pemerintah adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety* net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah luar biasa ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN untuk memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama.

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya luar biasa untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah wabah COVID-19. Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama pemerintah untuk menghadapi pandemi. Presiden telah menginstruksikan agar prioritas kebijakan APBN di tahun 2020 fokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Pemerintah juga menyediakan dukungan non-fiskal dalam rangka memperlancar ekspor dan impor pada sektor dan komoditas tertentu.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Intensitas pandemi yang terus meningkat serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Di dalamnya termasuk penyediaan stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun. Bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan juga dioptimalisasi oleh otoritas untuk menangani COVID-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program PEN. Program ini merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya.

Pada 11 Mei 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

(COVID-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi COVID-19. Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok, antara lain :

- a. prinsip yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program PEN;
- b. mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19;
- c. pelaksanaan program PEN melalui PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan;
- d. pemulihan ekonomi melalui belanja negara yang antara lain dilakukan melalui pemberian subsidi bunga;
- e. pembiayaan program PEN untuk memberikan kejelasan mengenai sumber dana program PEN dimaksud; dan
- f. pelaporan, pengawasan dan evaluasi untuk tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan program PEN.

Sebagai bagian krusial dari penanganan COVID-19 pada kesehatan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat, penerbitan PP 23/2020 menjadi langkah awal pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah, yaitu melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Pilihan skema intervensi dimaksud akan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu target kelompok pelaku usaha yang akan diberikan stimulus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk memastikan Program PEN berjalan sesuai dengan tujuannya, PP 23/2020 mengatur prinsip pelaksanaan program PEN yang terdiri atas asas keadilan sosial, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel, tidak menimbulkan *moral hazard*; dan adanya pembagian risiko dan biaya (*cost and risk sharing*) antar pemangku kepentingan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mengkaji delapan strategi pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19, yaitu :

a. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, perluasan daftar investasi positif, percepatan integrasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja serta melakukan program pelayanan purna investasi yang ada agar tidak pindah ke negara lain.

b. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi keunggulan kompetitif sektor-sektor industri unggulan: optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitas ekspor; fasilitas impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Agreement (FTA), dan Comprehensive Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

c. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan dan stabilitas sektor keuangan.

d. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi (wilayah) yang sudah pulih; peningkatan event olahraga, seni budaya dan meetings, incentives, conferences, dan exhibitions (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur dan standar layanan; pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

e. Penguatan Sektor Kesehatan

Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kapasitas sistem kesehatan terutama surveilans dan sistem informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan.

f. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informasi.

g. Pengembangan Infrastruktur

Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

h. Pembangunan SDM

Program peningkatan SDM; kartu Prakerja, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pendidikan Usia Dini.

Strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai insentif dan stimulus



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

program pemulihan ekonomi nasional yang dimulai pada 2020, dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui potongan pajak ataupun pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun orang pribadi, penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi potensi tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat. Beberapa sektor utama antara lain:

1. Sektor Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian
 9. Revitalisasi Sektor Manufaktur melalui fasilitasi daya saing ekspor, deregulasi untuk menghilangkan hambatan investasi, dan peningkatan kualitas daya saing input khususnya melalui perbaikan infrastruktur logistik dan konektivitas.
2. Pengembangan Sektor Pariwisata melalui prioritas pada peningkatan aspek 4A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi dan amenitas) serta 2P (promosi dan peningkatan partisipasi pelaku usaha).
3. Pemberdayaan UMKM

2.7 Arah Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Pada tataran lokal, strategi relaksasi dan pemulihan ekonomi daerah harus mulai disusun dengan mengembangkan rencana pembukaan kembali sektor ekonomi secara perlahan-lahan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan dan terus melakukan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

pembenahan dan penguatan sektor kesehatan sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan pasien. Pola kehidupan masyarakat akan sepenuhnya berubah dan harus beradaptasi dengan realitas baru hingga vaksin virus Corona ditemukan. Dan masyarakat harus berdamai dengan keadaan keadaptasi kebiasaan baru agar perekonomian kembali bergerak. Beberapa langkah-langkah strategis pemulihan utama yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah:

a. Siapkan Strategi Pemulihan

Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan strategi pemulihan, peta, hingga tahapan yang akan dilakukan meskipun saat ini Indonesia masih dalam tahap mitigasi. Setelah mitigasi selesai dan berikutnya masuk ke tahapan pemulihan sehingga perlu disiapkan sektor apa yang bisa langsung berbalik arah naik (rebound), mana yang lambat, bagaimana rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan dan prioritas program.

b. Identifikasi Sektor Terdampak

Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengidentifikasi secara detail dan memilah dengan cermat terkait sektor mana saja yang terkena dampak pandemi COVID-19. Ini bertujuan untuk menunjukkan sektor mana yang bisa bertahan dan bisa ambil peluang saat wabah Corona. Terdapat beberapa sektor yang terpukul mulai dari UMKM, pariwisata, konstruksi hingga transportasi. Namun terdapat beberapa sektor yang masih bisa berjalan yaitu tekstil dan produk tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan jasa logistik.

c. Program Stimulus Ekonomi Menjangkau Semua Pelaku Usaha

Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan program stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Sektor yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, menengah



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

dan besar saja. Tapi juga usaha mikro dan ultra mikro dan program stimulus ekonomi ini juga harus menjangkau sektor informal tidak hanya sebatas sektor formal.

d. Akses UMKM ke Lembaga Keuangan Formal

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro sektor informal ke lembaga keuangan formal. Pemerintah daerah harus terus mendorong terlaksananya program edukasi dan literasi keuangan yang menyasar kepada sektor ini untuk meningkatkan inklusi keuangan. Program ini harus terintegrasi dengan program dukungan penguatan UMKM daerah.

e. Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja

Pemerintah pusat telah menyiapkan program stimulus ekonomi agar pelaku usaha dapat bertahan dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa insentif perpajakan, restrukturisasi kredit serta relaksasi impor bahan baku. Kepala daerah didorong untuk merancang program yang sama bahkan perlu untuk menambah, memperkuat dan memperluas program stimulus dengan skema yang jelas, transparan, dan terstruktur sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Kepala daerah harus dapat menjelaskan dan merinci terkait stimulus apa yang diberikan kepada badan usaha untuk meminimalisir jumlah pengangguran karena terjadinya pemecatan tenaga kerja di daerah. Lebih lanjut, pemerintah daerah didorong untuk melakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas paket stimulus ekonomi sehingga berdampak pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor riil. Lapisan masyarakat



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

yang sering terlupakan dan tidak tercakup dalam berbagai jaring pengaman sosial adalah masyarakat “miskin baru”. Sebelum pandemi COVID-19, mereka adalah masyarakat lapisan menengah dan sangat terdampak selama pandemi COVID-19 sehingga menjadi masyarakat miskin baru. Mereka tidak terdata sebagai kelompok masyarakat rentan yang berhak atas skema bantuan sosial.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti kaedah kuantitatif maupun kualitatif. Pengungkapan pertanyaan penelitian ditelusuri melalui data-data sekunder yang dikembangkan dan dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan stakeholder seperti pelaku usaha sektoral maupun pengambil kebijakan.

Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer melalui survei (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kajian ini adalah melalui:

- a. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian.
- b. Penyebaran angket/kuesioner



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- c. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dari dokumentasi, dokumen perencanaan daerah, hasil penelitian/kajian, buku, jurnal yang relevan dengan masalah kajian.
- d. *Focus Discussion Group* (FGD) yaitu diskusi terbatas dan terarah dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian.

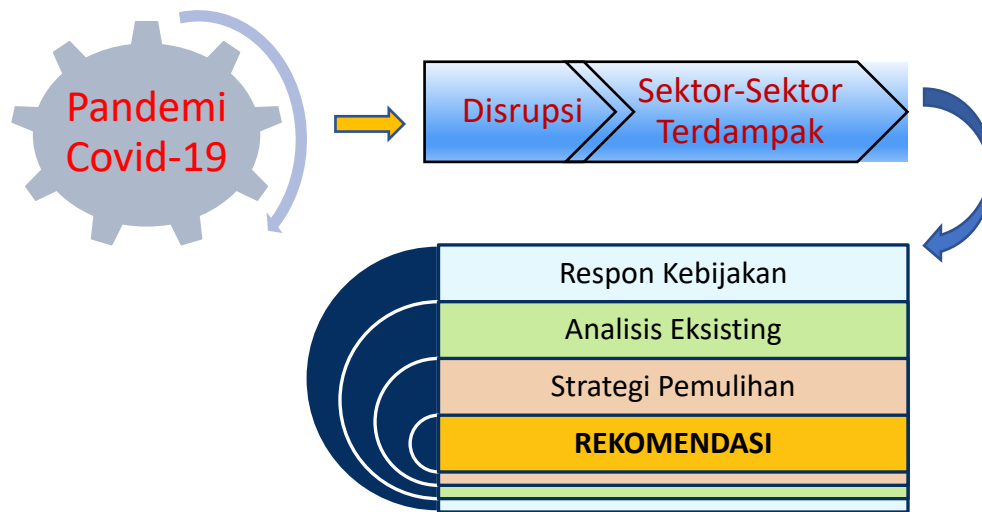
Analisa kualitatif dilakukan berdasarkan hasil data dari wawancara, pengamatan dan observasi langsung, hasil gambar visual dan pemotretan, serta beberapa data-data instansional yang berkaitan dengan semua materi penelitian ini. Analisis kualitatif sendiri dapat bersifat deskriptif, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid 19.

Analisa kuantitatif dilakukan terhadap data maupun publikasi statistik dan penyebaran kuesioner/angket. Data yang diperoleh yang kemudian di analisis disajikan dalam bentuk :

1. Naratif, menyajikan data ke dalam bentuk narasi dalam sebuah paragraf, digunakan untuk menyajikan data kualitatif
2. Tabulasi, menyajikan data-data ke dalam tabel.
3. Diagram, menyajikan data-data dalam bentuk diagram agar mudah dipahami oleh pembaca.

3.2 Kerangka Operasional

Kerangka operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai kerangka model yang dapat menyederhanakan pengamatan alur kajian secara terarah dan efektif. Secara grafis, dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar III.1
Kerangka Operasional

Sumber: Tim Peneliti

3.3 Tahapan Analisis

Analisis kajian dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan, diantaranya:

- Pengumpulan dan analisis data kajian untuk mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor dalam pembangunan. Analisis terhadap data-data sekunder yang bersumber dari publikasi maupun kajian relevan khususnya yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 di Kepulauan Riau. Analisis diawali dengan penilaian terhadap indikator-indikator utama perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19, lalu dilanjutkan dengan analisis terhadap sektor-sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan sektor-sektor pembangunan dalam lingkup Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah. Penentuan sektor atau bidang dari



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan mempertimbangkan bobot sumbangsih dan tekanan keterpaparan pandemik dalam pembangunan diantaranya Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang UMKM sedangkan Urusan Pilihan pada Sektor Pariwisata.

- b. Analisis deskriptif terhadap kebijakan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada masing-masing sektor. Analisis kemudian diperkuat dengan evaluasi terhadap kondisi eksisting meliputi implikasi kebijakan dan permasalahan. Dimensi permasalahan yang timbul menjadi alat analisis untuk melanjutkan tahapan perumusan strategi-strategi dalam upaya memulihkan sektor-sektor yang terdampak COVID-19.
- c. Perumusan strategi pemulihan diperkuat dengan evaluasi atas efektivitas respon kebijakan dengan akses permasalahan yang ditimbulkan serta kesesuaian dengan tujuan kurva landai dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19.
- d. Rekomendasi

3.4 Kalender Pelaksanaan Kegiatan

Berikut ini dapat dilihat rincian tahapan kegiatan penelitian selama 3 (tiga) bulan pada Tabel III-1 di bawah.

Tabel III-1
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persiapan Administrasi												
	Teknis Pelaksanaan												
	Presentasi Laporan Pendahuluan												



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Instrumen Pengumpulan Data													
Turlap Pengumpulan Data													
Kompilasi dan Olah Data													
Analisis dan Lap. Antara													
Rapat Pembahasan													
Draft Laporan Akhir													
Presentasi Lap. Akhir													
Revisi													
Administrasi Penyelesaian													
Cetak Laporan Akhir													
Administrasi Kegiatan													

3.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, struktur gambaran dokumen pelaporan hasil kegiatan akan mengandung rincian, yaitu :

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan, dasar hukum pelaksanaan kajian ini, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok mengapa penelitian perlu dilakukan termasuk pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dan tujuan penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur

Bab ini akan membahas tentang tinjauan literatur yang berkaitan dengan situasi pandemik dan dampaknya terhadap perekonomian secara umum dan sektoral.

BAB III : Metode Penelitian



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pada Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, strategi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV: Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sektor-Sektor di Provinsi Kepulauan Riau

Bab ini mengupas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor ekonomi maupun pembangunan sosial yang menjadi bidang-bidang strategis dalam konteks pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V : Strategi Pemulihan

Bab ini mengupas tentang pilihan-pilihan strategi dalam pemulihan sektor-sektor yang terdampak COVID-19.

BAB VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini mengandung kesimpulan kajian dan rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil kajian.



BAB IV

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR-SEKTOR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini mengupas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor ekonomi maupun pembangunan sosial yang menjadi bidang-bidang strategis dalam konteks pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

4.1 Kinerja Perekonomian

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, di antaranya yang paling utama pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat inflasi.

4.1.1 *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi Kepri selama ini menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi pernah terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.02 persen. Namun setelah itu turun menjadi 4.98 persen di tahun 2016 bahkan terus anjlok sampai sebesar 1.98 persen di tahun 2017. Tren positif dimulai pada tahun 2018 pada tingkat sebesar 4.58 persen hingga menyentuh level 4.89 persen di tahun 2019. Sayangnya, tren tersebut terhenti dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang kemudian menyebabkan angka pertumbuhan kembali anjlok hingga sebesar minus 3,80 persen yang merupakan rekor pertumbuhan terendah Kepri sejak berdiri sendiri sebagai Provinsi sendiri. Berikut data perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau sejak 2015 hingga 2020 (implikasi pandemi Covid-19).



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Tabel IV-1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	6,54	6,17	5,29	5,05	4,89	-3.59
Bintan	5,16	5,05	4,94	4,85	4,71	-4.28
Natuna	3,90	3,00	0,87	2,53	1,75	-4.29
Lingga	2,38	4,09	6,08	4,00	5,18	-0.68
Kepulauan Anambas	3,03	2,90	-0,1	-8,21	-0,13	-7.83
Batam	6,87	5,43	2,61	4,96	5,92	-2.55
Tanjungpinang	5,70	5,01	2,63	3,21	3,27	-3.45
Provinsi	6,02	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

Sumber : BPS Kepri.

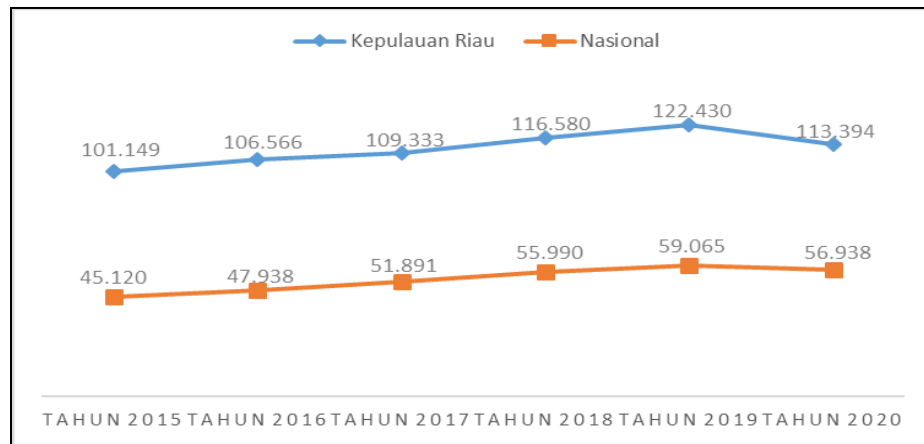
4.1.2 Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku telah mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku sebesar Rp 101.149 ribu cenderung terus meningkat hingga menjadi Rp 122.430 ribu pada tahun 2019. Namun tren peningkatan tersebut kemudian turun pada tahun 2020 hingga menjadi Rp 113.394 ribu pada tahun 2020. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dampak pandemi Covid-19 yang telah melemahkan fundamental perekonomian secara simultan baik dari sisi permintaan maupun penawaran.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Grafik IV.1
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020 (Ribu Rupiah)

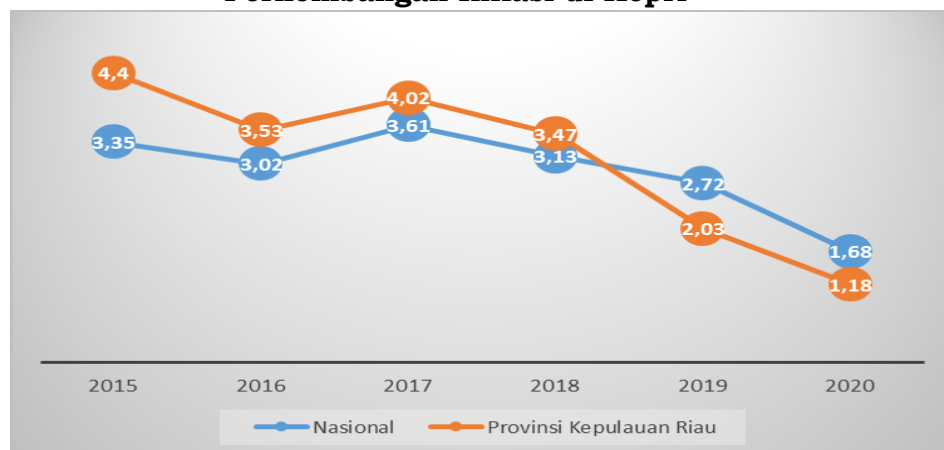


Sumber : Barenlitbang Kepri, 2021

4.1.3 Inflasi

Secara umum, inflasi difahami sebagai indikasi kenaikan harga dalam jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat pula menunjukkan efisiensi kerja ekonomi maupun tingkat keseimbangan ketersediaan barang dan jasa di sebuah wilayah. Tren perkembangan inflasi tahunan Kepulauan Riau dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik IV.2
Perkembangan Inflasi di Kepri



Sumber : BPS Kepri



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Secara makro, tren inflasi di Kepri mirip dengan tren nasional walaupun secara nilai masih relatif lebih tinggi. Dalam kurun 5 tahun terakhir, dapat dilihat bagaimana perilaku fluktuatif inflasi sebagai implikasi dari respon permintaan dan penawaran di pasaran. Pembentukan inflasi sendiri dipengaruhi oleh sejumlah komoditas penyumbang yang menjadi komposisi dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan diperoleh dari gabungan tingkat inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang sebagai referensi. Kedua kota ini sampai saat ini termasuk dari 82 kota di Indonesia yang menjadi basis tingkat inflasi nasional. Apabila dilihat dari gambaran inflasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas, terlihat bahwa pergerakan inflasi Kepri mengalami penurunan di tahun 2020 pada tingkat 1,18%, lebih rendah dari nilai tingkat inflasi pada tahun 2019 sebesar 2,03%. Tahun 2020 merupakan periode pandemik dimana penurunan inflasi sangat berkaitan dengan efek turunnya daya beli masyarakat di satu sisi dan tekanan terhadap kurva penawaran yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial maupun pengetatan protokol kesehatan sehingga berdampak pada volume maupun pasokan hasil produksi.

4.2 Dampak terhadap Sektor-Sektor dalam Ekonomi

Pembentukan PDRB dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi produksi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

4.2.1 Sektor-Sektor Produksi dalam Pembentukan PDRB

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Tabel IV-2
Perkembangan PDRB di Kepri
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2020

Lapangan usaha	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,21	-3,16	-0,70	-4,39
Pertambangan dan Penggalan	-4,59	1,35	0,16	-4,17
Industri Pengolahan	1,53	4,14	6,25	3,25
Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	-1,32	3,30	-4,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,54	1,07	-0,06	-2,78
Konstruksi	3,45	7,93	8,23	-6,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,27	6,28	6,10	-12,72
Transportasi dan Pergudangan	5,45	0,91	-8,87	-40,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,93	10,17	9,95	-41,01
Informasi dan Komunikasi	7,69	10,71	11,84	16,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	5,77	4,82	-3,10
Real Estate	4,33	-0,37	0,12	-8,33
Jasa Perusahaan	7,25	6,84	-8,82	-41,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	7,00	1,52	7,97
Jasa Pendidikan	9,88	1,32	0,44	-8,20



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,29	3,04	2,78	-2,05
Jasa Lainnya	6,43	18,40	0,86	-68,83

Sumber BPS Kepri 2021

Berdasarkan data PDRB lapangan usaha provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 hingga 2020 dapat dikatakan sangat fluktuatif. Akan tetapi penurunan yang sangat tajam hampir disemua sektor terjadi pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi covid 19 yang terjadi pada akhir tahun 2019. Beberapa sector malah mengalami kontraksi yang cukup dalam, dan ada sector yang mengalami penurunan tapi tidak mengalami kontraksi seperti industry pengolahan yang masih tumbuh sebesar 3,25 persen. Walaupun demikian ada sector-sektor yang malah mengalami peningkatan dari dampak pandemi covid 19. Sektor-sektor tersebut adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang mengalami peningkatan sebesar 16,55 persen ditahun 2020, naik sebesar 4,71 persen dibandingkan tahun 2019. Kemudian sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial yang mengalami peningkatan sebesar 7,97 persen, atau meningkat sebesar 6,45 persen dibandingkan tahun 2019.

Sektor-sektor yang mengalami kontraksi rata-rata disebabkan oleh dampak pandemic covid 19. Walaupun demikian ada sector yang mengalami kontraksi tetap tidak disebabkan oleh dampak pandemic melainkan akibat dari kebijakan seperti sector Pertambangan dan Penggalian. Kebijakan pelarangan ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah Melalui UU minerba yang diberlakukan tahun 2014 menyebabkan kecenderungan penurunan di sector ini. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dampak pandemic lebih disebabkan oleh multifier effect akibat penurunan tingkat konsumsi atau pengeluaran dari pemerintah, masyarakat dan swasta.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Sektor yang paling tinggi mengalami kontraksi adalah sector jasa lainnya yaitu -68.83 persen. Kategori jasa lainnya dalam hal ini adalah meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dsb. Sector ini mengalami penurunan yang cukup dalam akibat dampak pandemic yang menyebabkan penurunan dari sector lain yang menopang sector ini. Seperti sector transportasi yang mengalami penurunan menyebabkan arus barang dan arus orang mengalami penurunan yang cukup signifikan menyebabkan produksi di sector ini tidak terserap maksimal. Begitu juga akibat dari menurunnya tingkat konsumsi masyarakat berdampak pada kontraksinya sector ini.

Sector-sector lainnya yang cukup besar mengalami kontraksi adalah sector jasa perusahaan yaitu minus 41, 88 persen ditahun 2020. Sector ini mencakup jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kemudian jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya. Pandemic covid 19 menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada konsumsi sector swasta. Penurunan kedua konsumsi tentu akan menurunkan sector jasa perusahaan.

Berikutnya sector lain yang mengalami kontraksi dua digit akibat dampak pandemic covid 19 adalah sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami kontraksi minus 41,03 persen. Kemudian disusul sector transportasi dan perdagangan yang mengalami kontraksi



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

minus 40,23 persen. Berikutnya sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga mengalami kontraksi dua digit yaitu minus 12,72 persen. Sector-sektor ini memiliki multifiler effect yang saling mempengaruhi satu sama lain. Akibat penurunan salah satu sector akan berakibat menurunkan sector yang lainnya. Penurunan ini tidak terlepas dari konsumsi yang menurun dari masyarakat yang tentunya juga akan menurunkan konsumsi swasta, sedang kan konsumsi pemerintah lebih diarahkan untuk mengurangi tingkat penyebaran pandemic dan dampak social. Pemulihan konsumsi masyarakat akan memberikan multifiler effect pada sector yang paling dalam terkena dampak. Pemulihan salah satu sector yang terdampak akan menyebabkan pemulihan disektor lainnya.

Tabel IV-3
Gambaran Sektor-Sektor PDRB Yang Paling Terdampak
Akibat Pandemi COVID-19

No	Sektor-Sektor	Pertumbuhan
1	Jasa lainnya	-68,83
2	Jasa Perusahaan	-41,88
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-41,01
4	Transportasi dan Pergudangan	-40,23
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-12,72

Sumber: Data BPS Kepri, diolah.

Selanjutnya, sektor-sektor yang mengalami kontraksi satu digit diurutkan dari yang paling besar adalah sector real estate yaitu minus 8,33 persen, sector jasa pendidikan yaitu minus 8,20 persen, kemudian sector konstruksi yaitu minus 6.40. Penurunan sector real estate akibat pandemic covid 19 menurunkan konsumsi masyarakat untuk barang-barang kebutuhan tertier akibat ketidakpastian situasi pendapatan yang dimilikinya. Banyak masyarakat yang menahan konsumsinya dan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

mengalihkan konsumsi untuk kebutuhan primer dan sekunder terlebih dahulu. Begitu juga disektor pendidikan juga mengalami penurunan minus 8,20 persen akibat sekolah daring. Pandemic covid 19 menyebabkan proses belajar mengajar secara offline menjadi terhambat. Sedangkan belajar mengajar via online belum tersiapkan secara sempurna. Terhambatnya mulai dari infrastruktur yang belum memadai dan peserta didik yang belum memiliki kemampuan menyebabkan sector jasa pendidikan belum mampu untuk menyesuaikan situasi keadaan. Sedangkan disektor konstruksi dan sector-sektor lainnya juga mengalami kontraksi akibat dari penurunan sector lainya yang menopang sector tersebut. Pemulihan pada sector-sektor yang memberikan muliflier effect yang besar maka akan memberikan dampak pemulihan pada sector-sektor yang di topang. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran agar memberikan *multifiler effect* pada sector-sektor lainnya.

4.2.2 Sektor-Sektor Pengeluaran dalam Pembentukan PDRB

PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. PDRB berdasarkan pengeluaran terdiri dari: 1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; 2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; 3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; 4. Pembentukan modal tetap domestik bruto; 5. Perubahan inventori; dan 6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Tabel IV-4
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan
Menurut pengeluaran (persen), 2017-2020

Komponen pengeluaran	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah Tangga	6,40	5,06	5,24	0,53
Konsumsi LNPRT	5,09	10,00	6,43	-4,67
Konsumsi Pemerintah	0,69	0,26	2,30	-3,19
PMTB	1,48	9,06	6,04	-5,08
Perubahan Inventori	-41,04	48,32	165,73	-94,46
Ekspor	0,81	2,33	4,48	-2,44
Impor	0,27	3,40	5,06	-1,77

Sumber BPS Kepri 2021

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan di Provinsi Kepulauan Riau selama empat tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan positif, tetapi cenderung berfluktuasi. Pertumbuhannya secara berturut-turut yaitu sebesar 6,40 persen (2017); 5,06 persen (2018); 5,24 persen (2019) dan 0,53 persen (2020). Tahun 2020 Kontraksi sebesar 4,71 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sejalan dengan hal itu, konsumsi per kapita juga terus tumbuh positif meskipun pertumbuhannya berfluktuasi, namun pada tahun 2020, mengalami kontraksi dikarenakan dampak pandemic covid 19.

Semua kelompok konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan. Dan hampir semua mengalami penurunan minus dan hanya 3 kelompok yang mengalami penurunan positif. 3 kelompok yang mengalami penurunan positif menurut data BPS Kepri yaitu kelompok konsumsi perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 3,13 persen. Kemudian kelompok konsumsi lainnya sebesar 1,38 persen dan terakhir kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok sebesar 1,35 persen. Sedangkan kelompok konsumsi yang mengalami pertumbuhan minus di urutan dari yang paling besar adalah kelompok konsumsi Hotel & Restoran yang mengalami kontraksi sebesar minus 8.85 persen. Berikutnya kelompok konsumsi Kesehatan &



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pendidikan yang mengalami kontraksi minus 1,23 persen, kelompok konsumsi Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya yang juga mengalami kontraksi minus 0,96. Kelompok konsumsi yang terakhir mengalami pertumbuhan minus adalah pakaian yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,08 persen.

Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa. Beberapa pengeluaran dari LNPRT terdiri dari: a. Konsumsi pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimile, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan sebagainya. Konsumsi LNPRT pada tahun 2020 mengalami kontraksi minus 4,67 persen. Hal ini akibat dampak pandemic covid 19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ormas dan organisasi profesinya lainnya. Kegiatan organisasi non profit banyak dilakukan melalui daring akibat aturan pemerintah yang melarang untuk berkumpul dalam suatu acara.

Konsumsi Pemerintah provinsi Kepulauan Riau secara total, selama kurun waktu 2017-2019 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah daerah meningkat sebesar 0,69 persen. Kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,26 persen. Ditahun 2019 konsumsi pemerintah daerah mengalami peningkatan kembali sebesar 2,30 persen dan ditahun 2020 kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 3,19 persen.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Penurunan konsumsi akhir pemerintah menjadi 14.952,63 miliar rupiah ditahun 2020 ini karena dampak pandemi covid 19.

Penurunan konsumsi pemerintah pada tahun 2020 disebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020. Pendapatan daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 mencapai Rp11,48 triliun atau menurun sebesar Rp1,87 triliun atau 14,05 persen dari tahun 2019. Penurunan tersebut berasal penurunan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp24,96 miliar. Begitu juga dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan. Dana Perimbangan seluruh Pemda di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13,73 miliar dibandingkan tahun 2019.

Dampak dari pandemic covid 19 ini menyebabkan pengeluaran pemerintah provinsi Kepulauan Riau mengalami refocusing. Hasil refocusing APBD untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di provinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp230,08 miliar sesuai dengan SKB Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Anggaran hasil penyesuaian APBD tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan PMK Nomor 185/PMK.02/2020. Ada 3 klaster/program realokasi APBD Kepri tahun 2020 yang menjadi prioritas yaitu klaster kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos) dan klaster UMKM. Selain mempertimbangkan porsi anggaran pendapatan daerah di Kepri. Total refocusing APBD yang difokuskan pada ketiga klaster tersebut mencapai Rp230,09 miliar atau sebesar 5,86 persen dari total penyesuaian anggaran di Kepri. Realisasi pelaksanaan dan pemanfaatan APBD untuk ketiga klaster tersebut sudah cukup memuaskan yaitu mencapai 95,36 persen. Klaster perlindungan sosial menjadi fokus utama mengingat sebanyak pandemi Covid-19 menjadi



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian dan gerak cepat dari pemerintah.

Berdasarkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepri tahun 2020 Klaster perlindungan sosial tidak hanya mendapatkan alokasi yang lebih tinggi secara nominal, tetapi secara persentase realisasi juga tinggi mencapai 98,67 persen dibandingkan klaster kesehatan dan UMKM. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkontribusi paling tinggi sebesar 65,72 persen dari total realisasi anggaran, disusul kemudian program kesehatan yang berkontribusi sebesar 34,28 persen, dan klaster UMKM hanya berkontribusi sebesar 0,13 persen dari total realiasi. Alokasi anggaran untuk program PC-PEN di Kepri tersebut berasal dari realokasi masing-masing jenis belanja yang bersumber dari APDB di Kepri. Belanja barang/jasa berkontribusi paling tinggi terhadap program PC-PEN yaitu sebesar 68,58 persen dari total anggaran, disusul dengan alokasi belanja bantuan sosial sebesar 9,93 persen. Jika dilihat berdasarkan alokasi anggaran, bidang kesehatan mendapatkan alokasi terbesar yang berasal dari belanja barang dan jasa dan belanja pegawai. Bidang perlindungan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan alokasi terbesar yang berasal dari belanja barang dan jasa, serta pemberian insentif bagi UMKM mendapat alokasi dari belanja bantuan social.

Konsumsi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada data diatas juga mengalami kontraksi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 5,08 persen. PMTB merupakan bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Konsumsi ini lebih kepada investasi fisik atau modal disektor swasta di provinsi kepulauan riau. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Kontraksi pada konsumsi PMTB ini tidak terlepas dari dampak pandemic covid 19. Banyaknya pihak swasta/investor yang melihat dan menunggu (wait and



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

see) untuk menanamkan investasi atau membelanjakan modalnya kedalam bentuk fisik di provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tidak terlepas dari situasi ketidakpastian ekonomi di provinsi kepulaun Riau akibat pandemic covid 19.

4.2.3 Sektor-Sektor Strategis

4.2.3.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Sektor UMKM merupakan salah satu yang tidak dapat terhindari dari dampak buruk pandemik Covid 19. Sektor UMKM telah mengalami perlambatan di antaranya penyerapan produk, ketersediaan bahan baku, dan proses distribusi (Bahtiar & Saragih, 2020). Salah satu pemicunya adalah pelemahan di sektor pariwisata yang sangat berdampak pada penyerapan produk UMKM (Amri, 2020). Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi telah mengkonfirmasi dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM telah menimbulkan penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, bahkan bisa berujung pada terancamnya sektor perbankan dan keuangan mengingat intermediasi pembiayaan keuangan terhadap UMKM yang sangat signifikan. Secara nasional, sebanyak 37.000 pelaku UMKM telah melaporkan terjadinya sebanyak 56% penurunan penjualan, 22% masalah pembiayaan, 15% masalah distribusi barang, 4% masalah dalam aksesibilitas bahan baku barang (Pakpahan, 2020).

Dengan pembinaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau yang relatif masih kecil yaitu sebesar 0,45% (Barenlitbang Kepri, 2021), dapat dipastikan dampak Covid-19 begitu terasa bagi para pelaku UMKM. Mereka yang kerap diidentikkan dengan kesulitan mendapatkan modal usaha ini mengalami penjualan dan omset yang menurun, kesulitan bahan baku sehingga pada akhirnya menghambat proses produksi dan distribusi produknya.

Berdasarkan penilaian Satgas Covid-19 Provinsi Kepri yang bersumber dari dinas teknis yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, sebanyak



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

1.444 dari 106.290 UMKM Se- Provinsi Kepri yang terdampak secara langsung pasca Covid-19. Permasalahan yang terjadi didominasi pada permodalan dan penjualan yang menurun, selain itu sulitnya bahan baku juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena terlambatnya transportasi yang digunakan dalam distribusi bahan baku sehingga mengakibatkan penurunan omset yaitu dari sebelumnya Rp 3,95 M menjadi Rp 1,29 M.

Temuan Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau setidaknya turut berhasil mempetakan dampak buruk yang dialami oleh UMKM akibat pandemi Covid-19, diantaranya:

1. Dari Segi Keberlangsungan Perusahaan

- ☐ Usaha Mikro: sebanyak 19,25% mengurangi kapasitas, 11,18% berhenti, *Work From Home* 4,97%, dan yang beroperasi normal tinggal sebanyak 63,98%.
- ☐ Usaha Menengah Kecil: sebanyak 40,24% mengurangi kapasitas, 10,98% berhenti, 10,98% menggunakan *Work From Home*, dan yang beroperasi normal hanya tinggal sebanyak 37, 80%;dan
- ☐ Dapat dipastikan tidak terjadi momentum penambahan kapasitas bagi UMKM di Kepri dalam menghadapi suasana pandemik saat ini.

2. Dari Segi Pendapatan

- ☐ Usaha Mikro: sebanyak 75,78% menurun, sebanyak 22,36% tetap, dan yang mengalami peningkatan pendapatan hanya sebanyak 1,86%.
- ☐ Usaha Menengah Kecil: sebanyak 92,68% menurun dan hanya sebanyak 7,31% yang tetap pendapatannya dan tidak terdapat peningkatan pendapatan pada kelompok UMK.

4.2.3.2Pariwisata

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, kinerja sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun adalah relatif baik. Namun



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

dengan adanya pandemi Covid-19 otomatis jumlah kunjungan wisatawan telah berkurang secara drastis. BPS Provinsi Kepulauan Riau melansir penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 99,80% akibat kebijakan pembatasan sosial dan pengetatan protokol kesehatan pada periode Desember 2020 berdasarkan perbandingan tahunan (*year on year*). Persentase penurunan tersebut diperoleh dari 542 kunjungan wisman pada Desember 2020, dibandingkan dengan jumlah 276.914 kunjungan wisman pada periode yang sama di tahun 2019. Sedangkan dilihat dari periode akumulasi Januari-Desember 2020, maka penurunan kunjungan wisatawan mancanegara berkurang sebanyak 85,64% dari semula sebanyak 2.864.795 kunjungan menjadi 411.248 kunjungan.

Menurut laporan Satgas Covid-19 Kepri, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata terdiri atas:

- ☐ Perhotelan: Sebanyak 76 hotel yang tutup akibat sepiunya kunjungan wisatawan.
- ☐ Travel : Pengurangan Jumlah karyawan yang signifikan.
- ☐ Transportasi : Kehilangan orderan (permintaan)
- ☐ Destinasi wisata : sepi kunjungan
- ☐ Spa : berhenti operasional.
- ☐ Karnaval : berhenti aktivitas.
- ☐ Restoran : berhenti operasional.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata di Kepri juga berakibat pada nasib sebanyak 14.000 pekerja sektor wisata yang terdiri dari industri travel, perhotelan, asosiasi pariwisata, hingga ekonomi

Insert :

14.000 Pekerja Wisata Kepulauan Riau Terdampak Covid-19

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar, mengatakan, terdapat sekitar 14.000 pekerja sektor wisata yang terdampak Covid-19. Pekerja tersebut terdiri dari industri travel, perhotelan, asosiasi pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Data terdampak Covid-19 tersebut dihimpun hingga bulan Mei 2020. Pihaknya akan terus memperbarui perkembangan data terbaru. "Para pekerja tersebut rata-rata terkena dampak PHK, dirumahkan, hingga mendapat upah sebagian oleh perusahaan tempat mereka bekerja," kata Buralimar di Tanjungpinang, Jumat (7/8).

Menurut Buralimar, permasalahan yang dialami tiap-tiap pelaku maupun asosiasi pariwisata berbeda-beda sebagai akibat dari pengaruh pandemi COVID-19 ini. Misalnya, perhotelan, hampir semuanya mengalami penurunan kunjungan wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini membuat perusahaan mengambil kebijakan mem-PHK maupun merumahkan karyawannya.

Selain itu, ada beberapa hotel yang tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Namun, gaji karyawan yang tadinya dibayar penuh, terpaksa dipotong menjadi sebagian atau setengah dari gaji pokok. "Ekonomi kreatif, seperti event organizer, pun sepi permintaan buat penyelenggaraan even-even keramaian, karena terkendala imbauan pemerintah soal social distancing/menjaga jarak," sebut Buralimar.

Sumber ; *Republika.co.id*, 7 Agustus 2020.

kreatif. Dampak yang diterima oleh para pekerja ini bervariasi ada yang dalam bentuk PHK, dirumahkan, dikurangkan jam kerja atau pengurangan upah atau gaji sebagai karyawan.

4.3 Dampak Sosial

Dalam dimensi sosial ekonomi, pandemi Covid-19 juga telah berimplikasi pada memburuknya sejumlah indikator dari bidang-bidang strategis pemerintahan daerah, di antaranya bidang sosial (kesejahteraan masyarakat), ketenagakerjaan dan bidang pendidikan.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

4.3.1 Kesejahteraan Masyarakat

Dampak pandemi Covid-19 terhadap Kesejahteraan masyarakat

Insert :

COVID-19 picu kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau Agus Sudibyo mengatakan pandemi COVID-19 turut memicu kenaikan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. "Salah satu dampak pandemi menyebabkan tingkat pengangguran terbuka naik, imbasnya angka kemiskinan ikut meningkat," kata Agus Sudibyo di Tanjungpinang, Rabu.

Berdasarkan survei sensus penduduk BPS, kata Agus, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kepri pada September 2020 mencapai 142.611 orang atau 6,13 persen. Angka tersebut bertambah sebanyak 10.645 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 131.966 orang atau 5,92 persen. "Sedangkan dibanding September 2019, penduduk miskin di Kepri bertambah 14.538 orang," ujar Agus.

Sumber ; *antaranews.com*, 18 Februari 2021

dilihat dari indikator kemiskinan.

Sebagaimana pandemi Covid telah memicu kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia, gambaran serupa juga terlihat pada jumlah dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kepulauan Riau pasca hantaman pandemi Covid-19. Hal ini tercermin berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, bahwa pada

bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142.611 orang atau setara dengan 6,13 persen, yang berarti terjadi pertambahan sebanyak 10.645 orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2020 yang berjumlah sebanyak 131.966 orang atau 5,92 persen. Dari segi sebaran, jumlah pertambahan penduduk miskin ini tercermin baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Misalkan awalnya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan (Maret 2020) sebesar 5,42 persen, naik menjadi 5,69 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 10,43 persen turut mengalami



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

kenaikan menjadi 11,25 persen pada September 2020. Sedangkan dari segi jumlah maka penduduk miskin di daerah perkotaan naik dari 108.859 orang pada Maret 2020 menjadi 121.823 orang pada September 2020, sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 23.107 orang pada Maret 2020 menjadi 20.788 di September 2020. Selain itu, kondisi memburuknya data kemiskinan di turut disertai dengan naiknya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Berikut dilampirkan data profil kemiskinan di Kepulauan Riau.

Tabel IV-5
Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

Profil Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	122.398	120.412	125.370	131.676	128.462	142,61
Persentase Penduduk Miskin (persen)	6.24	5.98	6.06	6.20	5,9	5,92
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	454.147	494.418	216.418	563.993	597.894	619.461
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (persen)	0,97	0,89	1,18	0,591	0,69	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (persen)	0,25	0,20	0,23	0,24	0,12	0,42

Sumber : BPS, diolah.

4.3.2 Ketenagakerjaan

Dampak pandemi Covid-19 dalam aspek ketenagakerjaan dilihat dari perubahan pada jumlah dan tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Merosotnya kegiatan perekonomian akibat pandemi Covid-19 menunjukkan korelasi yang kuat terhadap meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana dilansir oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau, dengan kenaikan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 1.133.776 orang atau naik sebanyak 64.802 orang dari periode yang sama setahun yang lalu dan disertai kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,59 persen poin, pandemi Covid-19 telah menyebabkan kenaikan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 10,34 persen (Agustus 2020) yang



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

meningkat sebesar 2,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Kenaikan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ini menunjukkan telah terjadi kenaikan jumlah para penganggur dari kelompok angkatan kerja yang ada. Sedangkan dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.016.600 orang, naik sebanyak 27.783 orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Pertanian (1,39 persen poin) dan Jasa Pendidikan (1,28 persen poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Industri Pengolahan (1,15 persen poin) dan Konstruksi (0,92 persen poin).

Dampak Covid-19 juga menggeser komposisi pekerja formal yang semula berjumlah 656.634 orang (64,59 persen) turun 5,84 persen poin dibanding Agustus 2019. Sedangkan persentase pekerja informal mengalami kenaikan sebesar 5,84 persen poin.

Secara garis besar, BPS mengkategorikan dampak korban pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau dari sebanyak 288.549 orang (16,87) persen penduduk usia kerja terdiri atas: (1) pengangguran karena Covid-19 42.210 orang; (2) Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 sebanyak 8.587 orang; (3) sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 12.568 orang; dan (4) penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 yaitu sebanyak 225.184 orang.

Tabel IV-6
Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2018	2019	2020
1	Provinsi Kepri	7.12	6.91	10.34
2	Kota Batam	8.93	7.72	11.79
3	Kota Tanjungpinang	5.49	5.64	9.3



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

4	Kabupaten Bintan	5.89	8.01	8.86
5	Kabupaten Karimun	2.45	5.46	8.36
6	Kabupaten Natuna	3.52	3.33	4.1
7	Kabupaten Anambas	2.46	2.91	3.44
8	Kabupaten Lingga	3.65	4.01	4.41

Sumber : BPS. diolah

Tahun 2021 tingkat penganggutan terbuka menunjukkan indikasi yang lebih baik dengan turun sebesar 0,22 persen sehingga menjadi 10,12 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.037.133 orang, naik sebanyak 20.533 orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Pertanian (1,39 persen poin) dan Jasa Pendidikan (1,28 persen poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Industri Pengolahan (1,15 persen poin) dan Konstruksi (0,92 persen poin). Sedangkan Sebanyak 670.375 orang (64,64 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,05 persen poin dibanding Agustus 2020. Penurunan TPT ini dipercaya berkaitan dengan implikasi momentum pemulihan ekonomi yang mulai kelihatan.

4.3.3 Pendidikan

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada kegiatan ekonomi masyarakat, namun juga terhadap dunia pendidikan. Saat ini, sekolah dan lembaga pendidikan dapat menjadi tempat yang paling rentan terhadap pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kekebalan anak-anak, kurangnya jarak fisik di dalam kelas, bus sekolah, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oleh karena itu, solusi teraman untuk lembaga pendidikan harus beralih dari pembelajaran konvensional ke alternatif pembelajaran daring (*online*).

Tingginya risiko penyebaran di ruang-ruang kelas pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) normal menyebabkan sekolah terpaksa ditutup dan proses belajar mengajar normal dialihkan menjadi kegiatan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Belajar dari Rumah (BDR). Secara umum, pelaksanaan BDR selama pandemi COVID-19 masih jauh dari ideal. Dari sisi sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan, masalah disparitas ketersediaan layanan antar wilayah tentu menjadi isu tersendiri mengingat Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau yang jarak tempuh satu sama lainnya tidak sama dan relatif menantang. Belum lagi kesenjangan akses jaringan teknologi internet antara daerah-daerah perkotaan maupun daerah pedesaan yang banyak tersebar di beberapa daerah pulau terluar seperti Kabupaten Natuna, Anambas, dan Lingga.

Yang tidak kalah

penting, pelaksanaan BDR tidak dapat dilepaskan dari permasalahan kemampuan pembiayaan dan ketersediaan peranti pendukung di tingkat keluarga sehingga menyebabkan tidak semua peserta didik dapat menikmati layanan PJJ secara optimal. Dari sisi kapasitas dan mekanisme penerapan kurikulum, ketepatan metode dalam PJJ, sistem

Insert :

31 siswa SMA/SMK di Bintan putus sekolah efek pandemi COVID-19

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Dali mengaku sedang menelusuri adanya informasi 31 siswa SMA/SMK di Kabupaten Bintan putus sekolah karena efek pandemi COVID-19.

Ke-31 siswa siswa tersebut, terdiri 25 siswa SMAN 1 Bintan dan 6 siswa SMKN 1 Bintan. Mereka putus sekolah diduga karena kecanduan bermain gawai atau gim daring (online) dan memilih bekerja. "Sedang ditelusuri. Saya baru tahu informasi itu pagi ini," kata Dali di Tanjungpinang, Senin. Dali mengaku pihak SMAN 1 maupun SMKN 1 Bintan, sampai saat ini belum menyampaikan laporan secara resmi terkait 31 siswa putus sekolah tersebut.

Ia akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua dari 31 siswa itu untuk mengetahui apakah mereka betul-betul putus sekolah atau tidak. Menurut dia, tidak mudah membujuk mereka jika memang sudah tidak ingin lagi bersekolah.

Ia mengakui pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem daring akibat pandemi COVID-19, membuat siswa lebih banyak menghabiskan waktu bermain gawai di dalam atau luar rumah. Apabila minim pengawasan dari guru dan orang tua, dampaknya sangat buruk bagi si siswa. Belum lagi kondisi ekonomi terpuruk imbas pandemi ini, sehingga ada sebagian siswa yang lebih memilih bekerja untuk menopang perekonomian keluarga dibanding bersekolah.

Sumber ; *antaranews.com*, 31 Mei 2021



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

penilaian, serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, menyebabkan pelaksanaan BDR belum berjalan optimal, khususnya dalam memastikan penguasaan kemampuan kognitif dan non-kognitif siswa. Belum optimalnya dukungan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan PJJ di masa pandemi, diperkirakan akan menyebabkan penurunan kemampuan siswa (*loss of learning*), peningkatan angka putus sekolah, dan secara tidak langsung menurunkan potensi penerimaan peserta didik di masa depan. Sementara itu, dengan rendahnya upaya untuk mengatasi dampak psikis selama pelaksanaan PJJ diperkirakan mempengaruhi kondisi kesehatan mental, tidak hanya pada peserta didik, namun juga pada orang tua, pendidik, dan keluarga.

Hasil studi mengkonfirmasi sejumlah dampak yang tidak dapat dihindari dari pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan (Bappenas, 2021) yang disebabkan dengan beralihnya mode pembelajaran, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan BDR tanpa intervensi penguatan pada aspek pendukung kualitas pembelajaran berpotensi memberikan dampak pada penurunan kemampuan siswa (*learning loss*), penurunan tingkat lama bersekolah (*drop-out rate*), hingga penurunan pendapatan siswa di masa depan (*earning potential*).
- 2) Pada jenjang pendidikan tinggi, penutupan institusi pendidikan berbasis akademik dan vokasi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan hilangnya pembelajaran dalam jangka pendek,



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

bahkan kerugian sumber daya manusia dan berkurangnya peluang ekonomi dalam jangka panjang³.

- 3) Dampak lain yang juga diperkirakan terjadi akibat proses BDR adalah meningkatnya angka putus sekolah. Dampak pandemi terhadap perekonomian keluarga, serta masalah keterjangkauan anak dalam kondisi rentan, pada wilayah 3T, dan tidak memiliki dukungan fasilitas untuk PJJ menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan anak putus sekolah. Dari studi World Bank (2020)⁴, penutupan sekolah selama empat bulan akan meningkatkan kemungkinan anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, mencapai 0,13 p.p. (*percentage point*) atau setara dengan 48.175 siswa, dan 0,15 p.p (setara dengan 43.031 siswa) untuk jenjang pendidikan menengah.
- 4) Pelaksanaan PJJ yang tidak optimal juga memberikan pengaruh pada kondisi psikososial semua pihak yang terlibat, yang mendorong perlunya perhatian pada upaya peningkatan kesehatan mental anak, pendidik, dan orang tua untuk memastikan layanan pendidikan berkualitas.
- 5) Kegiatan belajar-mengajar jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah pada masa pandemi memberikan fleksibilitas dalam penerapan kurikulum namun belum mendorong ketercapaian

³ UNESCO. (2020). COVID-19 Education Response Webinar: Implications for The Global Higher Education Campus. 1-7.

⁴ World Bank. (2020). Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide. Jakarta: World Bank.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

kurikulum, sehingga tidak menjamin kualitas kompetensi lulusan⁵. Sama halnya dengan jenjang pendidikan tinggi dimana mengingat hampir seluruh proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan daring sehingga tingkat pencapaian target pembelajaran atau kompetensi tertentu menjadi tidak maksimal.

Sejauh ini, pengamatan terhadap kualitas pendidikan dapat dilihat dari sisi kompetensi lulusan baik SMA maupun SMK. Kompetensi lulusan SMA/MA diukur dari persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi. Kompetensi lulusan SMK diukur dari persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha dan persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non akademik (minat, bakat,

⁵ Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 719/p/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, Kemdikbud memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum: (1) tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, (2) menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), (3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Secara umum, Kemdikbud telah menekankan bahwa capaian kurikulum bukanlah prioritas di masa pandemi. Penyederhanaan kurikulum nasional dilakukan dengan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Penyederhanaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan fokus guru dan peserta didik pada pencapaian kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Namun demikian, penerapan kurikulum yang beragam antarsatuan pendidikan belum diiringi dengan langkah pengawasan, pengendalian dan *review* hasil yang dikaitkan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, dengan tidak tersedianya acuan yang jelas mengenai langkah penerjemahan kurikulum dalam proses pembelajaran, berpotensi memberikan ketidakpastian pada kualitas pembelajaran dan pengajaran. Hal ini mempengaruhi kualitas lulusan pada masa pandemi ini.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

prestasi). Kompetensi lulusan SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel IV-7
Indikator Kompetensi Lulusan Sekolah di Kepulauan Riau

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lulusan SMA						
Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT	<i>n/a</i>	15	35,42	43	56,30	58,50
Lulusan SMK						
Persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha	<i>n/a</i>	15	50	50	56,87	60,10
Persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi)	<i>n/a</i>	30	44,44	42,00	8,27	24,28

Sumber: Data Olahan Dinas Pendidikan

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia secara umum dan Kepulauan Riau pada khususnya tidak dapat terhindar dari dampak penghentian kegiatan belajar mengajar secara normal. Pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan melalui sistem daring (dalam jaringan) untuk meniadakan potensi meluasnya penyebaran Covid-19 yang bisa terjadi melalui interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik. Hal ini tentunya menyebabkan hambatan bagi peserta didik untuk mendapatkan mutu pembelajaran yang lebih baik yang biasanya diperoleh secara langsung melalui pembelajaran tatap muka di kelas.

Tantangan untuk mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Semua merupakan agenda pencapaian dari *Sustainable Development Goals* yang ke-4 (SDG-4). Disrupsi terhadap sektor pendidikan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran dan ketimpangan capaian Pendidikan.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Hal ini diungkap oleh SDGs Center Policy Brief No.3/2020 dalam *Perspektif 2030* (Juni, 2020). Kedua permasalahan tersebut tidak lain dipicu oleh isu keterbatasan infrastruktur dan sumber daya serta kondisi eksisting ketimpangan sosial masyarakat terutama jika dilihat dari perspektif pendapatan.

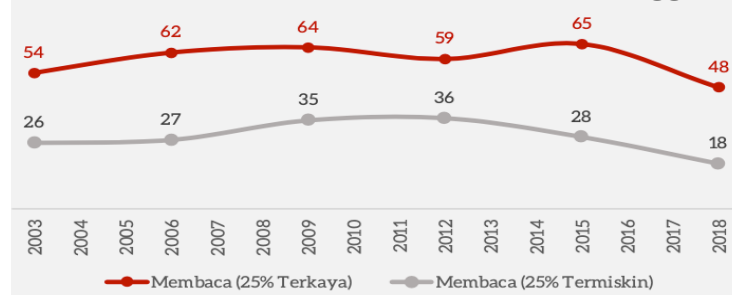
Potensi meningkatnya disrupsi akibat pandemi dilatarbelakangi dari temuan kajian monitoring SDG-4 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerja sama dengan UNICEF dan SDGs Center UNPAD. Kajian tersebut menyimpulkan problem utama Indonesia dalam pencapaian SDG-4 bukan pada akses terhadap Pendidikan, melainkan pada aspek kualitas dan kesenjangan. Rendahnya kualitas pendidikan terungkap dari hasil pengujian kemampuan dasar pengetahuan anak-anak sekolah berusia 15 tahun di berbagai negara dimana posisi Indonesia sejak 4 tahun terakhir menurun di semua bidang yang diujikan, yaitu sains, membaca dan matematika. Maka pandemi Covid-19 sangat besar kemungkinan telah memperparah rendahnya pencapaian kualitas pembelajaran tersebut. Menariknya, data tersebut menampilkan pula gambaran ketimpangan kemampuan dasar pengetahuan tersebut berdasarkan status ekonomi rumah tangga yang dilihat dari persentase dari sebanyak masing-masing 25% kelompok rumah tangga termiskin dan terkaya. Data berikut ini menjelaskan bagaimana persentase capaian kemahiran minimum membaca dan matematika dari 25% keluarga terkaya menempati proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan persentase dari 25% keluarga termiskin.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

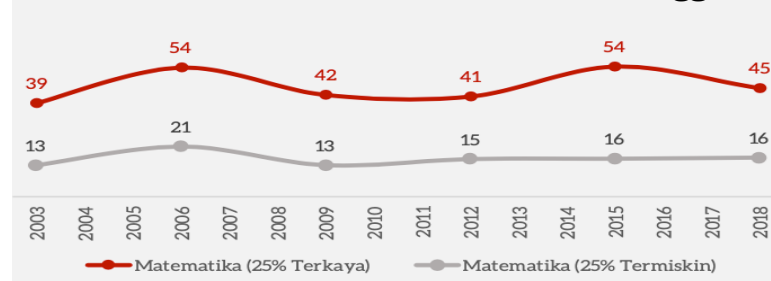
Grafik IV.3

Proporsi anak berusia 15 tahun yang mencapai kemahiran minimum dalam membaca berdasarkan status ekonomi rumah tangga



Grafik IV.4

Proporsi anak berusia 15 tahun yang mencapai kemahiran minimum dalam matematika berdasarkan status ekonomi rumah tangga



Sumber : *Programme for International Student Assessment*,
Kemendikbud RI-UNICEF-SDGs Center UNPAD

Dalam konteks Kepulauan Riau yang karakteristik wilayahnya didominasi oleh wilayah perairan laut (96%), pola data di atas sangat sesuai untuk merefleksikan indikasi yang sama. Selain tidak terlepas dari potret kemiskinan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, kondisi faktual lainnya di Kepulauan Riau masih belum dapat terhindar dari kesenjangan akses infrastruktur dan sumber daya terutama akses maupun literasi penggunaan internet di kalangan pelajar. Kesenjangan akses tersebut dipengaruhi baik dari latar belakang disparitas antar daerah maupun antar kelompok ekonomi.



BAB V

STRATEGI PEMULIHAN

5.1 Penyebaran Pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*) yang kemudian mulai menjadi pandemi global pada awal tahun 2020.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19) dimana penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung semakin cepat ke luar Wuhan (Tiongkok) bahkan hingga ke luar negeri⁶.

⁶ Berdasarkan "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" (PDF): 11–12, Retrieved 5 March 2020 tercatat sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: China 51.174 kasus konfirmasi dengan 1.666 kematian, Jepang (53 kasus, 1 Kematian dan 355 kasus di cruise ship Pelabuhan Jepang), Thailand (34 kasus), Korea Selatan (29 kasus), Vietnam (16 kasus), Singapura (72 kasus), Amerika Serikat



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sedangkan di Kepulauan Riau, temuan kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri pada tanggal 17 Maret 2020 yang menimpa seorang pria asal Kota Tanjungpinang berusia 71 tahun sepulangnya berobat dari luar negeri (Malaysia)⁷.

Sejak ditemukan pertama kali hingga per 29 Mei 2021, Pemerintah Provinsi Kepri telah merilis perkembangan data penyebaran pandemi Covid-19 yang mencakup keseluruhan wilayah kabupaten/kota. Tren kenaikan penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau tampak terlihat dalam grafik berikut ini.

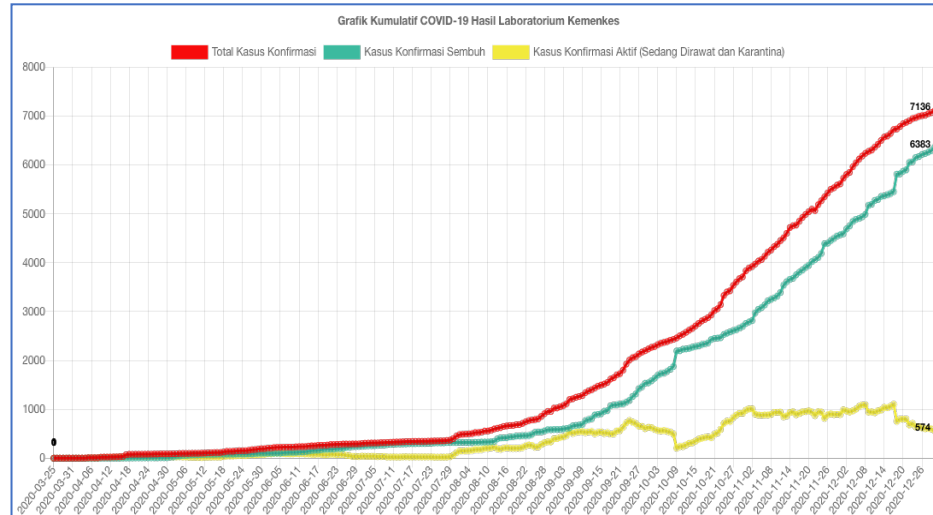
(15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15 kasus), Malaysia (22 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), Sri Lanka (1 kasus), Kanada (7 kasus), Jerman (16 kasus), Perancis (12 kasus), Italia (3 kasus), Rusia (2 kasus), United Kingdom (9 kasus), Belgia (1 kasus), Finlandia (1 kasus), Spanyol (2 kasus), Swedia (1 kasus), UEA (8 kasus), dan Mesir (1 Kasus).

⁷ Pengumuman temuan kasus pertama Covid-19 di Kepulauan Riau.
<https://www.republika.co.id/berita/q7djgl409/kasus-pertama-corona-di-kepri-pulang-berobat-dari-malaysia>



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Grafik V.1
Penyebaran Covid-19 di Kepulauan Riau Sepanjang 2020



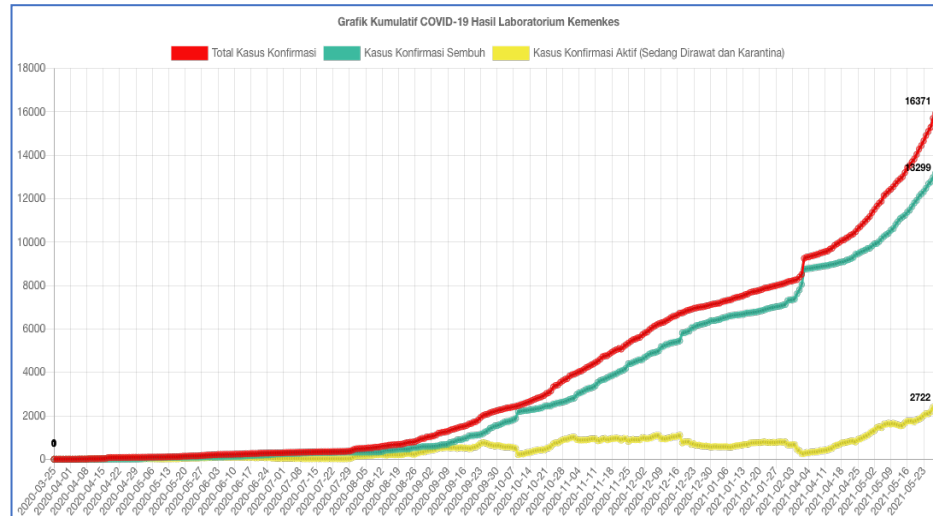
Sumber : corona.kepriprov.go.id

Berdasarkan grafik di atas, kenaikan penyebaran Covid-19 dapat dilihat pada total kasus konfirmasi yang diikuti dengan total konfirmasi sembuh, artinya walaupun jumlah kasus meningkat terus namun jumlah kasus yang dapat disembuhkan juga ikut bertambah. Tren ini masih berlanjut pada tahun 2021 apabila dicermati pada triwulan pertama dimana jumlah kasus konfirmasi dan jumlah kasus konfirmasi sembuh sama-sama mengalami peningkatan. Walaupun kenaikan jumlah kasus konfirmasi sembuh dapat dianggap sebagai indikasi yang baik, namun di lain sisi perkembangan kasus konfirmasi aktif semakin meningkat.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Grafik V.2
Penyebaran Covid-19 di Kepulauan Riau (per 29 mei 2021)



Sumber : corona.kepriprov.go.id

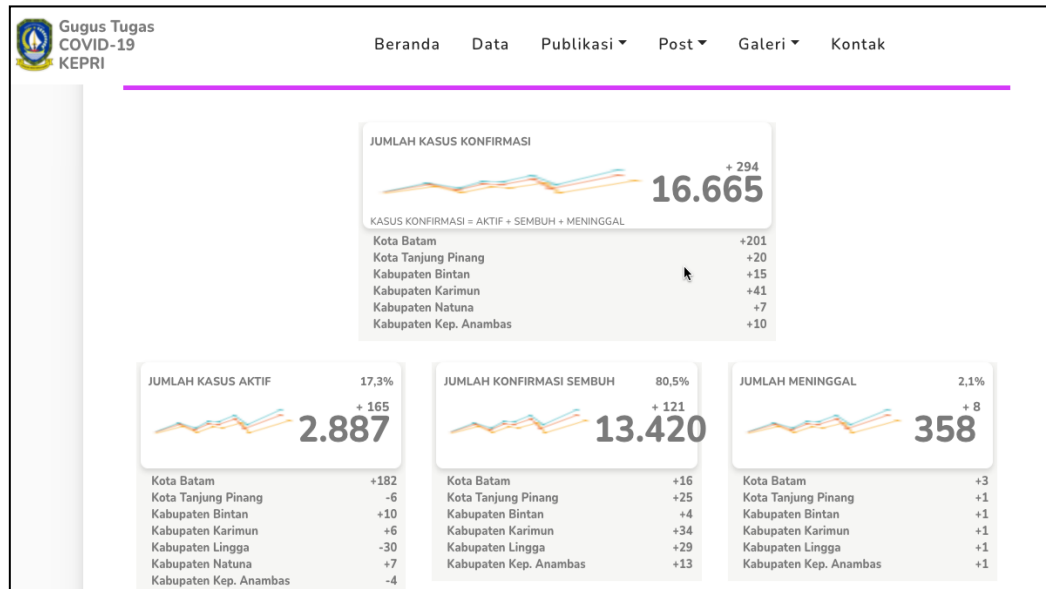
Sementara itu, rekor peningkatan kasus aktif Covid-19 di Kepulauan Riau pada tahun 2021 ini ditandai dengan masuknya momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pemerintah di satu sisi telah berhasil menekan jumlah mobilitas orang secara substansial melalui kebijakan peniadaan mudik, namun diyakini sejumlah orang masih dapat melakukan perjalanan mudik. Di lain sisi, momentum lebaran yang menjadi tradisi bersilaturahmi diyakini tidak dapat sepenuhnya dielakkan.

Di penghujung Mei 2021, jumlah kasus konfirmasi mengalami pertambahan. Sebagaimana data yang dilansir dari situs <https://corona.kepriprov.go.id/> , per 31 Mei 2021 total kasus konfirmasi telah bertambah sebanyak 294 kasus sehingga total menjadi 16.665 dimana sebaran tertinggi ditempati Kota Batam sebanyak 201 kasus, disusul kemudian Karimun, Tanjungpinang, Bintan, Anambas dan Natuna. Dari jumlah tersebut, kumulatif kasus konfirmasi aktif telah meningkat menjadi sebanyak 2887 dari pertambahan sebanyak 165



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

kasus aktif yang tersebar merata di seluruh Kabupaten/Kota (data terlampir).



Gambar V.1

Sebaran Pertambahan Kasus COVID-19 di Kepri Per 31 Mei 2021

Sumber : corona.kepriprov.go.id



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Walaupun kenaikan kasus aktif Covid-19 di Provinsi Kepri terhitung fluktuatif, namun beberapa hal ditandai telah ikut memicu kenaikan kasus aktif tersebut. Di antaranya yang menjadi perhatian adalah pemulangan

Insert :

Temuan Varian Baru Covid-19 di Kepri.

Setelah dilansir oleh media Antara di pertengahan April 2021 tentang temuan varian baru yakni varian B1525 yang dibawa masuk oleh klaster Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia (antaranews.com “*Varian baru COVID-19 ditemukan di Batam Kepri*”, 18 April 2021), Kepala Dinas Kesehatan Kepri M Bisri kembali mengumumkan varian baru lainnya yaitu B.1.1.7 yang diketahui merupakan varian berasal dari Inggris telah menginfeksi dua warga Kepri (regionalkompas.com “*Waspada, Corona B.1.1.7 Masuk Kepulauan Riau, 2 Warga Batam dan Tanjungpinang Positif*”, 27 Mei 2021). Menurut Bisri, varian baru ini jauh lebih agresif dibandingkan dengan varian yang biasa sehingga telah memicu penularan semakin cepat dan tinggi di Kepri. Oleh karena itu, ketaatan menjaga disiplin protokol oleh warga masyarakat sangatlah penting.

Sumber ; Dirangkum dari media online Antara dan Kompas.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang jumlahnya telah mencapai sebanyak 74 ribu orang selama kurun waktu pandemi yang telah berlangsung sejak Maret 2020. Hal ini salah satunya diperkuat dengan bukti hasil tes usap dengan metode PCR (swab) terhadap sebanyak 14.000 PMI yang baru tiba melalui Batam dan Tanjungpinang dimana sebanyak 200 PMI yang baru tiba dari Malaysia tersebut dinyatakan terjangkit virus Covid-19⁸. Ironisnya, perkembangan pesat kenaikan jumlah kasus aktif Covid-19 di Kepri ini turut disertai dengan temuan adanya varian mutasi Covid-19 yang mengkhawatirkan (*variant of concerns*) seperti varian Inggris

⁸ #Tiba di Kepri, 200 TKI yang Datang dari Malaysia Dinyatakan Positif Covid-19

<https://regional.kompas.com/read/2021/05/04/111319078/tiba-di-kepri-200-tki-yang-datang-dari-malaysia-dinyatakan-positif-covid-19?page=all>



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

(B.1.1.7)) dan B1525 (menular 10 x lebih cepat). Pada saat bersamaan, pemerintah pusat telah mengkonfirmasi temuan kasus Covid-19 berdasarkan variant of concerns di antaranya jenis varian B117 sebanyak 16 kasus, varian B1617 plus sebanyak 27 kasus, varian B1531 sebanyak 2 kasus dan varian B1525 sebanyak 1 kasus⁹.

5.2 Pemulihan : Dilema Aspek Kesehatan dan Non Kesehatan

Pandemi Covid-19 diketahui tidak saja telah menimbulkan bencana pada sektor kesehatan namun juga berbagai dampak negatif yang luas terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dihadapkan pada tantangan yang sangat dinamis dan kompleks maka kerap tidak mudah untuk diselaraskan antara tataran ideal dan praktik. Yang kentara, kerap kali terjadi konflik kepentingan antara langkah-langkah pemulihan yang membutuhkan fleksibilitas dengan langkah-langkah pengendalian yang lebih mempersyaratkan rigiditas (kekakuan). Misalkan pada pelaksanaan skema-skema kebijakan pembatasan yang secara umum telah menimbulkan disrupsi serius pada berbagai sektor ekonomi maupun sosial sehingga selalu tidak mudah diterima oleh banyak kalangan.

Bencana yang disebabkan oleh ancaman biologis memang memiliki tantangan tersendiri pada tahapan respons dan pemulihan karena kerumitannya (Jeremias & Martin, n.d.). Hal ini tidak terlepas dari sifat dasar pandemi, yang akan menciptakan perubahan konstan dalam penerapan struktur organisasi, infrastruktur dan teknologi, serta

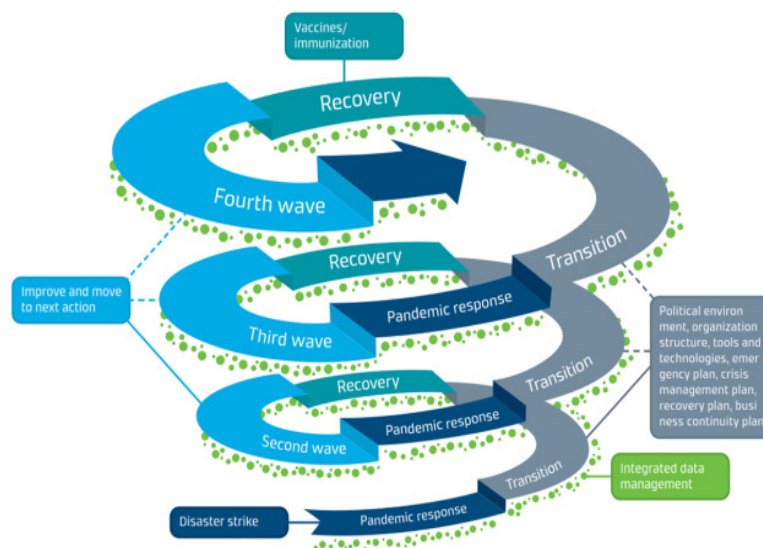
⁹ **#Pemerintah Temukan 46 Kasus Variant of Concern Covid-19 di RI, Ada Varian B1525**

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-temukan-46-kasus-variant-of-concern-covid-19-di-ri-ada-varian-b1525.html>



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

manajemen darurat, pemulihan, dan rencana kesinambungan khususnya untuk sektor ekonomi. Setiap gelombang baru pandemi memiliki karakteristik yang berbeda, dimana pendekatan dan kebijakan yang sama tidak dapat diterapkan, dan revisi pada setiap gelombang mungkin diperlukan untuk meminimalkan konsekuensi baru dari munculnya gelombang lanjutan. Secara ilustratif, hal ini ditunjukkan melalui grafis berikut ini yang dikutip dari Fakhruddin et.al (2020) dalam artikel jurnalnya bertajuk *“Are we there yet? The transition from response to recovery for the COVID-19 pandemic”* (Progress in Disaster Science, Vol. 7, October 2020).



Gambar V.2
Transisi Respon Pandemi ke Pemulihan

Saat ini penanganan pandemi COVID-19 di Kepulauan Riau (per Juli 2021) telah mengalami perkembangan penyebaran kasus yang lebih eskalatif dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dua daerah perkotaan di antaranya yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam telah ditetapkan status penanganan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Kegiatan Masyarakat) Skala Darurat mengigit kedua kota tersebut telah mencapai nilai asesmen level 4 yang berarti di daerah tersebut terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan dengan tingkat keterisian tempat tidur (*bed occupancy rate*) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen¹⁰. Sedangkan dalam hal status penyebaran pandemi Covid-19, dua daerah dengan status Zona Merah disandang oleh Batam dan Bintan, sedangkan kelima daerah lainnya dalam status Zona Oranye (per 17 Juli 2021). Namun dengan diterapkannya PPKM darurat pada Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, beban terhadap upaya pemulihan menjadi semakin berat mengingat kedua kota ini dipandang signifikan dalam sumbangannya terhadap kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kepulauan Riau secara relatif dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya.

Tabel V-1
Kategori Resiko Berdasarkan Status Zona

Status Zona	Keterangan
Hijau	Belum Terdampak
Kuning	Tingkat Resiko Rendah
Oranye	Tingkat Resiko Sedang
Merah	Tingkat Resiko Tinggi

Sumber : Kemenkes RI

Tabel V-2
Perkembangan Tingkat Resiko Covid-19
di Kepulauan Riau (21 Juli 2021)

Daerah	Status Zona	Keterangan
Batam	Merah	Resiko Tinggi
Tanjungpinang	Merah	Resiko Tinggi
Bintan	Merah	Resiko Tinggi

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709164347-20-665589/alasan-penetapan-ppkm-darurat-15-daerah-luar-jawa-bali>



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Karimun	Oranye	Resiko Sedang
Lingga	Oranye	Resiko Sedang
Natuna	Oranye	Resiko Sedang
Anambas	Oranye	Resiko Sedang

Sumber : <https://covid19.go.id/peta-risiko>

Dengan perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 ini, maka upaya menuju pemulihan dihadapkan pada tantangan yang semakin meningkat. Di samping tantangan pengendalian kesehatan yang berhadapan secara langsung dengan potensi peningkatan kasus Covid, pada saat yang sama pula pemulihan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin sulit untuk dipenuhi mengingat terbatasnya opsi yang relevan selain dari kebijakan pembatasan itu sendiri. Beberapa sektor sasaran yang diharapkan bisa mengalami pemulihan sampai saat ini masih belum bisa keluar dari perangkap pandemi. Keadaan ini secara umum dapat dilihat melalui gambaran data berikut ini.

Tabel V-3
Gambaran Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19
di Kepulauan Riau

No	Sektor/Bidang	Kondisi Eksisting		Indikasi Pemulihan
		Jan'20-Des'20	Jan'21-Juli'21	
1	Pariwisata	Penurunan tingkat kunjungan wisman sebesar -85,64% selama periode Jan-Des 2020 (yoy), terjadi di 4 pintu masuk Kepri seperti Bintan, Karimun, Batam dan Tanjungpinang. Tingkat hunian kamar Hotel turun sebanyak 29,26 poin dari 56,67% menjadi 27,41% pada periode yang sama.	Tren penurunan kunjungan wisman masih berlanjut: □ Jan-Mei 2019 – Jan-Mei 2020 turun (-64,74%); □ Jan-Mei 2020 – Jan-Mei 2021 turun (-99,66%). Tingkat penurunan ini masih lebih besar dari persentase penurunan akumulatif Jan-Des 2020 (yoy) pada tingkat (-85,64%).	Belum tercapai.
2	Koperasi dan UMKM	□ Sebanyak 1.444 UKM dari 106.290 di Kepri terdampak COVID-19 (Satgas COVID Kepri, 2021). □ Survey BPS Kepri: menemukan dampak COVID pada UMKM: pengurangan kapasitas, berhenti operasi, beroperasi dgn WFH. □ Pendapatan pada UMKM dilaporkan menurun, lalu sebagian kecil mengalami		Belum tercapai.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

		pendapatan yang tetap, dan hanya sedikit mengalami peningkatan pendapatan.	
3	Pendidikan	Pembelajaran Daring	Pembelajaran Daring
4	Kesejahteraan Sosial	□ Persentase Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 6,13 persen atau sebanyak 142,61 ribu jiwa, meningkat 0,21 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen atau bertambah sebanyak 10.64 ribu orang dan meningkat 0,33 persen poin dibanding September 2019 yang sebesar 5,80 persen atau bertambah sebanyak 14.85 orang.	□ Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2021 sebesar 6,12 persen atau sebanyak 144.46 ribu jiwa, menurun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 6,13 persen atau bertambah sebanyak 1.85 ribu jiwa dan meningkat 0,20 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen atau bertambah sebanyak 12.49 ribu jiwa.
5	Ketenagakerjaan	□ Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2020 sebesar 10,34 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. □ Terdapat 288.549 orang (16,87 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (42.210 orang), BAK karena Covid-19 (8.587 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (12.568 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (225.184 orang).	□ Mengalami perbaikan dari 10,34% pada periode Agustus 2020 menjadi 10,12% pada periode Februari 2021, namun tingkat tersebut malah diklaim sebagai tingkat pengangguran tertinggi di antara daerah provinsi lainnya di Indonesia. Pada saat yang sama, tingkat rata-rata nasional pengangguran berada pada angka sebesar 7,07%. Terdapat 142.593 orang (8,20 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (26.405 orang), BAK karena Covid-19 (8.190 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (9.216 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (98.782 orang).

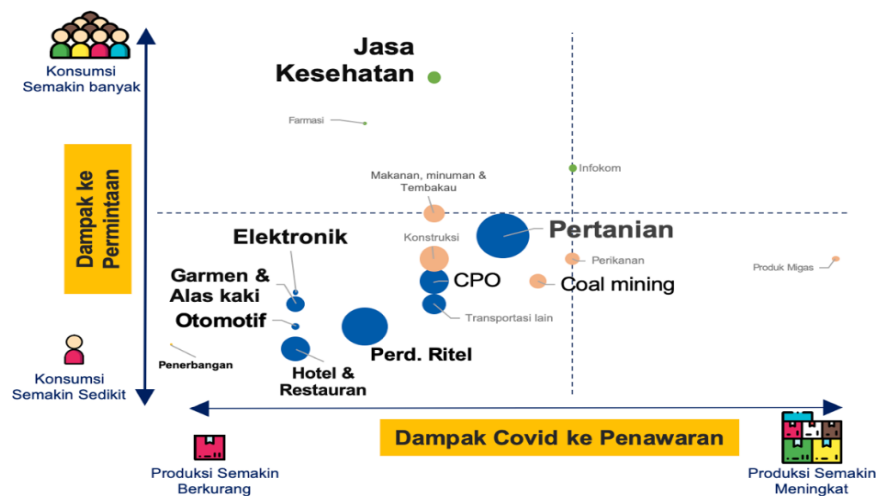
Sumber : BPS, Satgas, data diolah.

Apabila melihat pada kondisi eksisting, maka upaya pemulihan yang telah dilakukan akibat pandemi baru sebatas mengurangi



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

pemburukan dampak negatif yang lebih besar pada sejumlah sektor yang diamati di atas. Tambahan pula, upaya pemulihan itu tidak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari kemampuan dalam mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau. Apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif akan semakin sulit untuk dilakukan. Pada gilirannya, jalan menuju kondisi pemulihan juga akan semakin panjang. Secara ilustratif, hal ini dapat dijelaskan melalui analisis keterpaparan sektor-sektor akibat pandemi Covid-19 dimana peningkatan kasus dengan sendirinya akan menyebabkan menyusutnya konsumsi dan produksi sebagai elemen penting dalam mengupayakan pemulihan.



Gambar V.3

Gambaran Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor-Sektor

Sumber : COVID-19 Sectoral Analysis, Prospera 2020.

5.3 Kerangka Skenario Pemulihan

Di awal-awal meluasnya penyebaran kasus Covid-19, ekspektasi terhadap pemulihan belum dibayangkan-bayangi oleh pemburukan situasi yang dialami saat ini seperti temuan sejumlah varian baru terlebih lagi varian delta yang sangat agresif dari skala penyebarannya. Meskipun demikian, kesadaran akan sulitnya keluar dari perangkap pandemi Covid-



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

19 merupakan kenyataan umum yang luas diterima oleh khalayak masyarakat, terutama disebabkan oleh peningkatan kasus positif itu sendiri dan belum ditemukannya obat yang manjur maupun vaksin untuk mencegah penularan. Kendatipun demikian, pemerintah mulai berupaya menghadirkan energi positif demi memulihkan psikologi masyarakat akibat tekanan pandemik dengan menggulirkan pendekatan **Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*)** dalam realitas kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan pembatasan yang telah dilakukan belum terbukti sebagai solusi efektif baik untuk menghentikan penyebaran pandemik maupun untuk memulihkan kondisi pasca pandemik.

Pemerintah sendiri telah menetapkan 5 (lima) dimensi utama yang perlu diperhatikan agar adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) bisa berjalan dengan baik, di antaranya:

1. Syarat untuk masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru adalah menerapkan protokol tambahan pada fasilitas atau kegiatan dimana terdapat peluang sejumlah besar orang akan berkumpul, misalkan fasilitas-fasilitas umum, transportasi publik, dan tempat lainnya. Meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan sistem pengujian yang rumit, deteksi dini dan skrining skala besar sangat diperlukan untuk membuka kembali aktivitas perekonomian di berbagai daerah. Pemanfaatan teknologi seperti kamera pencitraan termal, tes cepat di bandara, stasiun kereta api, terminal bus, dan fasilitas umum lainnya, diperlukan untuk menghindari peningkatan kembali kurva COVID-19.
2. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pelanggaran pembatasan harus memenuhi syarat jumlah tes PCR setidaknya 1 orang per 1000 penduduk. Presiden telah menargetkan pemeriksaan menjadi 20.000 spesimen per hari. Solusi yang mungkin adalah penggunaan *rapid test* antibodi secara



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

periodik untuk memetakan penyebaran virus secara efektif pada kawasan-kawasan ekonomi utama, diikuti dengan uji PCR secara selektif serta melakukan pelacakan kontak, dan isolasi. Melanjutkan kegiatan ekonomi memerlukan pendekatan ‘selektif dan berkelanjutan’, dengan fokus utama pada daerah-daerah yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian, yang juga merupakan titik rawan infeksi.

3. Tempat rawan lainnya infeksi COVID-19 adalah fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit. Sifat virus yang mudah menular telah membebani fasilitas kesehatan dalam penyediaan fasilitas ruang isolasi dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam skala besar. Tenaga medis yang terinfeksi akan mengganggu beberapa prosedur dan tindakan medis baik kasus COVID maupun non-COVID. Pendekatan ‘tes di rumah’ ataupun *drive through* juga mungkin diperlukan sehingga hanya kasus-kasus berat yang ditangani rumah sakit. Pendekatan ini memberikan peluang bagi lembaga biomedis lokal/nasional untuk menghasilkan alat pengujian yang hemat biaya dan akurat, untuk Indonesia dan bagi masyarakat global di bawah inisiatif ‘*made in Indonesia*’.
4. Dengan infrastruktur kesehatan yang belum merata di seluruh daerah, pemerintah membutuhkan pendekatan inovatif dalam mempercepat pengujian, sekaligus mengurangi beban laboratorium. Pengujian gabungan (*rapid test* dan PCR) dapat membuka peluang perluasan cakupan tes, terutama di daerah berpenduduk padat atau kawasan perdesaan. Pengujian gabungan akan membantu dalam meningkatkan tingkat pengujian secara substansial, dan terus secara paralel mengidentifikasi titik rawan serta melacak penyebaran virus melalui deteksi kontak. Dengan jumlah kasus yang terus bertambah, perluasan perangkat pengujian dan keahlian perlu ditingkatkan untuk dapat membantu



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

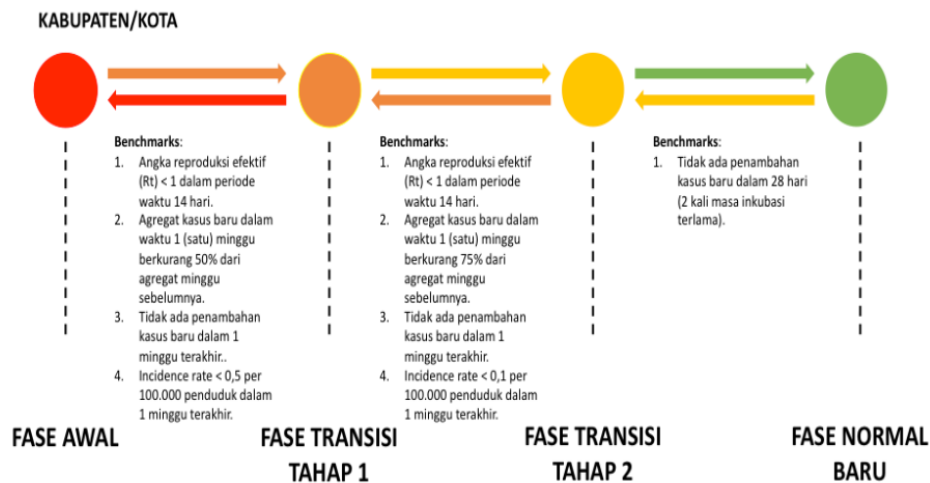
pemerintah dalam membuka pembatasan, sambil terus menjaga agar penyebaran infeksi tetap terkendali.

5. Kepadatan populasi yang tinggi pada beberapa area di kawasan perkotaan juga rawan akan kemungkinan penyebaran yang lebih besar. Kawasan area tertentu dengan tingkat kepadatan populasi tinggi harus mempertimbangkan fasilitas karantina sendiri. Ini mencakup perlindungan atas masyarakat yang berisiko tinggi dengan menjaga mereka tinggal di zona karantina yang terpisah. Meskipun kegiatan ekonomi telah dibuka secara bertahap, dukungan atas pengujian berkala dan pengawasan masyarakat secara aktif, serta pembatasan yang ketat terhadap orang yang terinfeksi dalam zona tertentu tetap diperlukan.

Pemenuhan lima dimensi utama di atas menjadi perhatian yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai basis tindakan dalam mengevaluasi kebijakan pembatasan. Hal ini ditetapkan sebagai tolok ukur (*benchmark*) atas tindakan yang sudah dicapai apakah bisa menjadi dasar untuk melangkah atau mendorong transisi dari satu fase ke fase yang lebih baik. Maka dari itu, upaya menuju adaptasi kebiasaan baru mengandung skenario fase yang terdiri dari tiga fase, diantaranya fase awal (kondisi daerah saat ini), fase transisi (peralihan menuju adaptasi kebiasaan baru) dan fase adaptasi kebiasaan baru. Setiap fase memiliki tolok ukur yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan untuk membuka kembali aktivitas sosial masyarakat.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI



Gambar V.4

Skenario Transisi Menuju Fase New Normal

Sumber : Kemendagri.

Dalam mengupayakan pencapaian skenario transisi, Pemerintah telah melakukan identifikasi kriteria aktivitas fisik dari sektor-sektor mana saja yang memerlukan pembatasan pada setiap fase agar bisa menuju fase yang lebih baik atau sebaliknya secara siklikal. Artinya, skenario transisi tersebut dapat bergerak dari fase dasar yang paling beresiko (zona merah) menuju satu fase setelahnya (zona orange) dan seterusnya atau malah mungkin sebaliknya yaitu dari fase dasar yang paling tidak beresiko (zona hijau) menuju satu fase setelahnya yang lebih beresiko.

Tabel V-4
Rasio Operasional Sektor-Sektor Menurut Fase Transisi

Aktivitas	Fase Transisi Tahap 1 (1-2 minggu)	Fase Transisi Tahap 2 (4-8 minggu)	Fase Transisi New Normal (8-16 minggu)
Fasilitas Kesehatan	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol
Ruang Terbuka	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Kantor Pemerintahan/Pelayanan Publik	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

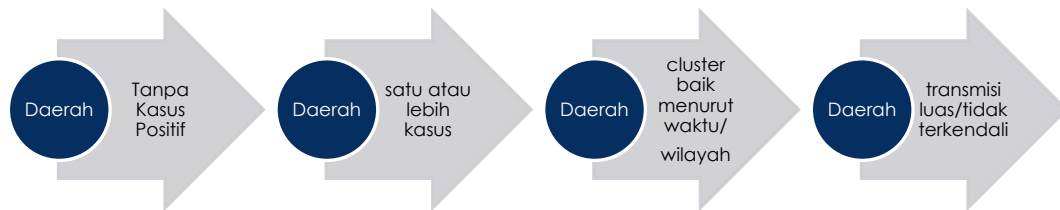
Perkantoran/Tempat Kerja	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Pabrik	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol
Pertokoan Retail	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Pasar Tradisional	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol
Mal/Pusat perbelanjaan	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Universitas/Perguruan Tinggi	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol
Sekolah (SD/SMP/SMA)	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Sekolah (TK/PAUD)	Belum Operasional	Operasional Kapasitas 50%	Operasional penuh dengan protokol
Pertemuan khusus (pernikahan/pertunjukan/olahraga)	Belum Operasional	Belum Operasional	Operasional Kapasitas 50%
Tempat Ibadah	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol
Restoran/Tempat Makan/CoffeeShop	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Transportasi Publik	Operasional dengan protokol	Operasional dengan protokol	Operasional penuh dengan protokol
Tempat Wisata	Operasional kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%	Operasional penuh dengan protokol
Bioskop/Bar	Belum Operasional	Operasional Kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%
Salon/Spa/Barber Shop	Belum Operasional	Operasional Kapasitas 50%	Operasional kapasitas 75%

Skenario transisi berdasarkan tingkat resiko merupakan strategi indikasi yang dapat dirujuk dalam upaya pemulihan untuk menuju ke fase perbaikan. Namun skenario tersebut tidak dapat terpisahkan dari scenario transmisi yang menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk mendeteksi dan menilai potensi pemburukan dari penyebaran kasus Covid-19. Skenario transmisi tersebut menjadi basis skenario bagi



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

pemerintah daerah untuk menyusun rencana tindak (responsif) apabila terjadi perkembangan transmisi di tingkat lokal:



Gambar V.5
Skenario Transmisi COVID-19 di Tingkat Lokal

Untuk menghadapi skenario transmisi, pemerintah daerah menyiapkan dan memastikan skenario keterpaparan dalam hal pengelolaan fasilitas kesehatan daerah, dengan upaya-upaya sebagai berikut:

Tabel V-5
Skenario Keterpaparan pada Fasilitas Kesehatan

No	Skenario	Aktivitas
1	Daerah Tanpa Kasus Positif	• Mengatur protokol skrining di semua titik akses ke fasilitas kesehatan, termasuk pusat kesehatan primer, klinik, unit gawat darurat rumah sakit, dan pengaturan komunitas lokal. Protokol harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bagi semua orang, terutama bagi kelompok marjinal. • Menyiapkan <i>hotline</i> telepon COVID-19 dan sistem rujukan untuk merujuk pasien ke tujuan yang tepat untuk penilaian klinis dan/atau pengujian sesuai protokol lokal. • Menyiapkan bangsal khusus COVID-19 di fasilitas kesehatan. Bangsal ini juga harus mudah atau aksesibel bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak dan lansia. • Melakukan <i>tracking</i> penemuan kasus aktif, pelacakan kontak dan pemantauan, karantina kontak, dan isolasi kasus yang diduga.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

2	Daerah dengan Transmisi Lokal	• Pemeriksaan di semua titik akses ke sistem kesehatan, termasuk pusat kesehatan primer, klinik, unit gawat darurat rumah sakit, dan pengaturan fasilitas komunitas sementara. Setiap fasilitas kesehatan harus dapat diakses oleh lansia, perempuan hamil, penyandang disabilitas. • Perawatan untuk semua pasien yang dicurigai dan dikonfirmasi positif COVID-19 dalam isolasi sesuai dengan tingkat keparahan penyakit dan kebutuhan perawatan akut di fasilitas rujukan COVID-19. • Lanjutkan pelacakan kontak yang cepat dan menyeluruh dan karantina kontak. • Persiapkan skenario berikutnya
3	Daerah dengan Transmisi Kluster	• Pemeriksaan dan skrining di semua titik akses ke sistem kesehatan, termasuk pusat kesehatan primer, klinik, unit gawat darurat rumah sakit, dan pengaturan fasilitas komunitas sementara. • Perawatan untuk semua pasien COVID-19 di area perawatan yang ditunjuk, sesuai dengan tingkat keparahan penyakit dan kebutuhan perawatan akut sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. • Lonjakan dengan bangsal yang telah diadaptasi atau ICU ke bangsal COVID-19 dan rumah sakit. Bangsal harus dapat diakses bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak dan lansia. • Ketika fasilitas kesehatan tidak dapat lagi mengelola pasien dengan penyakit ringan atau sedang, mengisolasi pasien yang tidak berisiko tinggi untuk penyakit parah (<60 tahun, tidak ada penyakit bawaan) baik di fasilitas masyarakat (misalnya stadion, gymnasium, hotel, atau tenda) dengan akses ke fasilitas khusus sesuai dengan pedoman WHO. • Jika pasien mengalami gejala yang berhubungan dengan komplikasi, pastikan rujukan cepat ke rumah sakit
4	Daerah dengan Transmisi Luas	• Pemeriksaan dan skrining di semua titik akses ke sistem kesehatan, termasuk pusat kesehatan primer, klinik, unit gawat darurat rumah sakit, dan pengaturan fasilitas komunitas sementara.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

	• Perawatan untuk semua pasien COVID-19 yang dicurigai dan dikonfirmasi di daerah perawatan yang ditunjuk, sesuai dengan tingkat keparahan penyakit dan kebutuhan perawatan akut sesuai dengan protokol kesehatan. • Lonjakan sistem kesehatan dengan struktur baru yang ditetapkan untuk pemberian perawatan, termasuk ekstensi rumah sakit yang ditunjuk untuk merawat pasien COVID-19. • Rumah sakit baru atau bangunan sementara dapat berfungsi untuk menambah perawatan pasien COVID atau layanan kesehatan utama, tergantung pada strategi nasional. • Perawatan semua pasien dengan risiko ringan dan rendah hingga sedang dengan penyakit yang dikonfirmasi positif pada fasilitas masyarakat yang ditunjuk (misalnya stadion, gymnasium, hotel, atau tenda) dengan akses ke layanan kesehatan cepat (yaitu melalui pos kesehatan COVID-19 khusus yang berdampingan, telemedicine) atau di rumah sesuai untuk pedoman WHO. • Jika pasien mengalami gejala yang mungkin berhubungan dengan penyakit parah atau komplikasi, pastikan rujukan cepat ke rumah sakit. • Bergantung pada strategi dan kapasitas pengujian, pasien ringan dan sedang mungkin tidak diuji, dan disarankan untuk melakukan isolasi sendiri baik di fasilitas komunitas yang digabungkan atau di rumah.
--	--

Dalam perkembangannya, kondisi penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami pemburukan. Hal ini bisa dilihat pada data bulanan perkembangan tingkat resiko yang berlaku di semua daerah kabupaten/kota di Kepulauan Riau per Agustus 2020 (corona.kepriprov.go.id/data.phtml). Secara umum, hanya Karimun, Natuna, Lingga dan Anambas yang pernah mengalami zona hijau atau belum terdampak Covid-19 namun dengan periode durasi yang tidak sama. Frekuensi zona hijau paling cepat dialami oleh Karimun, tiga



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

daerah lainnya sempat berlangsung lebih lama antara 2-3 bulan. Daerah yang lain sudah menunjukkan indikasi terdampak Covid-19 seperti Kota Batam, Tanjungpinang dan Kab. Bintan. Secara bertahap, pemburukan resiko kelihatan dari Tanjungpinang, Batam menyusul Bintan hingga Juni 2021 semua daerah kabupaten/kota di Kepri sudah terdampak resiko yang sedang (zona oranye). Memasuki awal Juli 2021, dua daerah yaitu Bintan dan Batam telah terdampak resiko yang tinggi (zona merah), disusul kemudian Kota Tanjungpinang pada pertengahan Juli 2021.

Tabel V-6
Perkembangan Tingkat Resiko COVID-19 Provinsi Kepri

No	Daerah	Periode 2020					Periode 2021							
		2-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec	1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	20-Jul
1	Tanjungpinang													
2	Bintan													
3	Batam													
4	Karimun													
5	Natuna													
6	Lingga													
7	Anambas													

Sumber : corona.kepriprov.go.id, diolah.

Dengan tren pemburukan yang konstan, upaya pemulihan lebih memerlukan pengembangan skenario untuk bisa mengantisipasi situasi yang terus berubah. Hal ini diperlukan agar skenario pemulihan benar-benar menghasilkan kesiapan untuk mengeksekusi tindakan-tindakan yang dianggap tepat di lapangan. Pendekatan skenario ini dilakukan dengan mengkompromikan kompleksitas aspek pengendalian kesehatan dan non-kesehatan yang tidak terlepas dari kemampuan menyelaraskan mekanisme di antara skenario transisi, skenario transmisi dan skenario keterpaparan. Dalam konteks skenario pemulihan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri sebagai koordinator penanganan pandemi COVID-19 memiliki peran sentral untuk mendorong efektivitas penanganan pandemi antar pemerintah kabupaten/kota melalui kebijakan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing secara kolaboratif, terkoordinir dan terintegrasi.



5.4 Refocussing APBD Kepri 2020 dan Implikasi Pemulihan

5.4.1 Kebijakan Refocussing

Terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menghadapi pandemi Covid-19 telah memberikan daerah kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19, bahwa kebijakan pendanaan untuk percepatan penanganan Covid-19 bersumber pada :

1. APBN; dan
2. APBD yang meliputi antara lain:
 - ☐ Pendapatan Asli Daerah dan revisi anggaran;
 - ☐ Belanja Tidak terduga;
 - ☐ Pemanfaatan dana kas tersedia yang terdiri atas: (1) Dana transfer pemerintah pusat; dan (2) Dana transfer antar daerah

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan (Permendagri 20/2020):

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan lebih rinci, bahwa daerah yang mengalami ketidakcukupan Belanja Tidak Terduga melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap:



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

1. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
3. Hasil Rasionalisasi anggaran antara lain: perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, Pendidikan dan pelatihan, Bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau kegiatan sejenisnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
4. Pengeluaran pembiayaan dan tahun anggaran berjalan;
5. Pemanfaatan dana berasal dari penerimaan daerah dalam APBD TA 2020.

Pelaksanaan kebijakan *refocussing* selanjutnya diperkuat melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dimana Kepala Daerah diminta untuk :

- 1) Melakukan Penyesuaian Taget Pendapatan;
- 2) Melakukan Penyesuaian Belanja Daerah;
- 3) Mendanai Prioritas Penanganan Covid-19;
- 4) Mengikuti Tata Cara Penggunaan Belanja Penanganan Covid19;
- 5) Melakukan Pengutamaan Penggunaan Anggaran Melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd TA. 2020; dan
- 6) Melaporkan Hasil Penyesuaian APBD Sesuai Batas Waktu Yang Ditentukan.

Adapun skema penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah yang dimaksudkan terdiri dari:



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Tabel V-7
Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	Penyesuaian	
	Target Pendapatan	Belanja Daerah
1	Penyesuaian Pendapatan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.	Rasionalisasi Belanja Pegawai
2	berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan	terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
2	Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah	Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa Sekurang-Kurangnya Sebesar 50%
	dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.	dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
3		Rasionalisasi Belanja Modal Sekurang-Kurangnya Sebesar 50%
		dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Selanjutnya, dari perhitungan Selisih Anggaran Hasil Penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut digunakan untuk mendanai:

1. **Belanja bidang kesehatan** dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
2. **Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net***, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
3. **Penanganan dampak ekonomi** terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

5.4.2 Implikasi Pemulihan

Dalam Pedoman Manajemen COVID-19 bagi Pemerintah Daerah (Kemendagri, 2020), mendorong pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dengan prioritas pada program bantuan sosial bagi warga yang terdampak merupakan salah satu butir poin dalam kerangka strategi pemulihan. Bantuan sosial tersebut dapat berbentuk bantuan langsung tunai atau bantuan sembako kepada warga miskin dan rentan miskin yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah daerah masih dapat melaksanakan penyaluran kegiatan dan anggaran untuk bantuan langsung masyarakat, di antaranya seperti:

1. Penyelenggaraan/pelaksanaan operasi pasar murah dan kebutuhan pokok;



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

2. Penyediaan dan penyaluran kebutuhan dasar korban bencana/Kejadian Luar Biasa;
3. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk menekan dampak *panic buying*;
4. Penanganan daerah rawan pangan;
5. Jaminan pemeliharaan kesehatan;
6. Pengadaan paket sembako kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial;
7. Perlindungan dan jaminan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial;
8. Pengawasan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
9. Pengawasan barang beredar;
10. Penyaluran bantuan logistik dan shelter.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengucurkan anggaran *refocussing* sebesar Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu rupiah (Rp. 230.089.954.387,-), yang terbagi ke dalam anggaran penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta bidang sosial (penanganan) jaring pengaman sosial. Dilihat secara komposisi belanja, realisasi jaring pengaman sosial mencapai porsi yang paling besar yaitu sebanyak 63,43% atau setara Rp. 145.941.181.775,- disusul penanganan bidang Kesehatan mencapai 36,45% atau setara Rp. 83.858.275.612,- dan penanganan dampak ekonomi sebesar 0,13% atau setara dengan Rp. 290.497.000,-. Maka itu, dilihat dari komposisi tiga kluster belanja *refocussing*, perlindungan sosial menjadi fokus utama yang harus mendapatkan perhatian dan gerak cepat dari pemerintah.

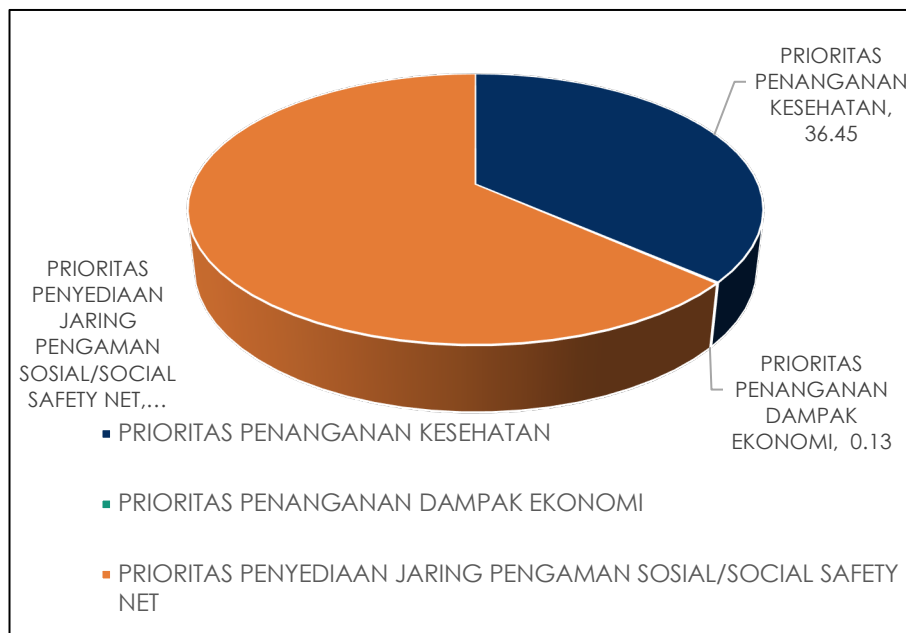
Kluster perlindungan sosial tidak hanya mendapatkan alokasi yang lebih tinggi secara nominal, tetapi secara persentase realisasi juga tinggi mencapai 98,67 persen dibandingkan kluster kesehatan dan UMKM.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkontribusi paling tinggi sebesar 65,72 persen dari total realisasi anggaran, disusul kemudian program kesehatan yang berkontribusi sebesar 34,28 persen, dan klaster UMKM hanya berkontribusi sebesar 0,13 persen dari total realisasi.

Grafik V.3
Persentase Realisasi Refocussing Pemerintah Provinsi Kepri, 2020



Sumber : BPKAD Kepri, 2020.

Tabel V-8
Alokasi Belanja Refocussing APBD Kepri TA 2020

URAIAN	Pegawai	Barang/ Jasa	Modal	Bansos	Lainnya	Total Belanja
Belanja bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19	18,08	40,14	13,49	0	12,14	83,86
Belanja bidang Perlindungan Sosial (Bantuan Langsung Tunai/BLT)	0,32	117,65	0	22,55	5,41	145,94
Belanja bidang UMKM	0	0	0	0,29	0	0,29

Sumber : KFR Kepri, 2020.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pelaksanaan *refocussing* kegiatan penanganan COVID-19 tersebut ditugaskan di sejumlah organisasi perangkat daerah di antaranya 13 OPD dalam penanganan bidang Kesehatan, 1 OPD dalam penanganan dampak ekonomi, dan 3 OPD dalam penanganan Jaring Pengaman Sosial.

A. Prioritas Kesehatan

Pelaksanaan *Refocussing* APBD Kepri TA 2020 pada prioritas kesehatan dilaksanakan oleh sebanyak 13 OPD, diantaranya:

1. Dinas Kesehatan, sebanyak Rp. 15,752,732,090.00, dalam bentuk:
 - ☐ Penanggulangan COVID-19
 - ☐ Pengelolaan Specimen COVID-19 dan Konfirmasi Laboratorium
2. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, sebanyak Rp. 32,776,800,453.00, dalam bentuk:
 - ☐ Penanganan Covid-19 Pada RSUD Raja Ahmad Tabib
 - ☐ Penanganan Covid-19 Pada RSUD Raja Ahmad Tabib Tahap II
3. Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud, sebanyak Rp. 9,472,950,000.00, dalam bentuk:
 - ☐ Penanggulangan Covid-19
4. Dinas Perhubungan, sebanyak Rp. 1,112,911,954.00, dalam bentuk:
 - ☐ Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau Gugus Tugas Area dan Transportasi Publik
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak Rp. 5,565,807,500.00, dalam bentuk:
 - ☐ Sekretariat Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau
6. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, sebanyak Rp. 12,142,841,985.00, dalam bentuk:



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- ☐ Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota
- ☐ Belanja Tidak Terduga
- 7. Inspektorat Daerah, sebanyak Rp. 2,100,000,000.00, dalam bentuk:
 - ☐ Akuntabilitas dan Pengawasan Penanganan Covid-19 Pada Provinsi Kepulauan Riau
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran, sebanyak Rp. 545,100,000.00, dalam bentuk:
 - ☐ Kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
- 9. Dinas Komunikasi Dan Informatika, sebanyak Rp. 2,102,351,480.00, dalam bentuk:
 - ☐ Partisipasi Media Center Dalam Mendukung Penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau
 - ☐ Publikasi Posko lawan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam
- 10. Biro Hukum, sebanyak Rp. 587,477,500.00, dalam bentuk:
 - ☐ Penyuluhan dan Monitoring Penanganan dan Pencegahan Covid-19
- 11. Dinas Pariwisata, sebanyak Rp. 1,420,802,650.00, dalam bentuk:
 - ☐ Operasional Penanganan Corona Virus Disease 2019
- 12. Dinas Pendidikan, sebanyak Rp. 200,000,000.00 dalam bentuk:
 - ☐ Fasilitasi Pelaksanaan UTBK-SBMPTN Dampak Covid-19 di Kota Batam
- 13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, sebanyak Rp. 78,500,000.00 dalam bentuk:



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- ☐ Operasional Tim Satuan Tugas Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Akibat Terjadinya Pandemi Covid-19

B. Prioritas Penanganan Dampak Ekonomi

Pelaksanaan *Refocussing* APBD Kepri TA 2020 pada prioritas penanganan dampak ekonomi dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp. 290,497,000.00 dalam bentuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Terdampak Ekonomi Akibat Covid-19.

C. Prioritas Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net* dilakukan oleh sebanyak 3 (tiga) OPD yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, sebanyak Rp. 27,964,716,825.00 dalam bentuk:
 - ☐ Hibah Kepada Instansi Vertikal Gugus Tugas Penanganan Covid-19
 - ☐ Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi - Di Bidang Lainnya
 - ☐ Bantuan Sosial Pembebasan / Keringanan Pendanaan Pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta
 - ☐ Bantuan Sosial Tidak Terencana Terdampak Covid-19
2. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, sebanyak Rp. Rp117,256,464,950.00 dalam bentuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri / Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Sosial Akibat Penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dinas Pendidikan, sebanyak Rp. Rp720,000,000.00 dalam bentuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan/



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pendampingan Pelaksanaan Penanganan Dampak Covid-19 Pada Kegiatan Belajar.

Pemerintah mendorong pelaksanaan strategi utama pemulihan dalam jangka pendek yaitu dengan fokus pada sektor-sektor yang paling terkena dampaknya tersebut di antaranya pariwisata dan pangan berikut peningkatan nilai sektor pertanian merupakan sektor sangat strategis mengingat tugasnya sebagai pemasok ketersediaan pangan sekaligus penyedia lapangan kerja terutama di masa pandemi dimana ketahanan pangan menjadi salah satu faktor kunci keberlanjutan di masa krisis.

Sedangkan sektor manufaktur diketahui merupakan

motor penggerak perekonomian nasional. Dalam konteks Kepri, sektor manufaktur juga merupakan kontributor utama PDRB baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pandemik COVID-19. Tahun 2020, sektor

Insert :

Analisis Dampak Belanja Refocussing : Alokasi Besar dengan Implikasi yang Masih Terbatas

Realisasi pelaksanaan dan pemanfaatan *refocusing* APBD untuk ketiga klaster di Kepri sudah cukup memuaskan yaitu mencapai 95,36 persen. Klaster perlindungan sosial tidak hanya mendapatkan alokasi yang lebih tinggi secara nominal, tetapi secara persentase realisasi juga tinggi mencapai 98,67 persen dibandingkan klaster kesehatan dan UMKM. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkontribusi paling tinggi sebesar 65,72 persen dari total realisasi anggaran, disusul kemudian program kesehatan yang berkontribusi sebesar 34,28 persen, dan klaster UMKM hanya berkontribusi sebesar 0,13 persen dari total realisasi.

Alokasi yang disalurkan melalui *refocusing* untuk penanganan Covid-19 di Kepri terbilang cukup besar, namun dengan anggaran tersebut seharusnya memberikan dampak terhadap efektivitas penanganan Covid-19 dan implikasinya terhadap perekonomian di Kepri. Secara komparatif, analisis dampak dilakukan melalui pendekatan Tabel *Input-Output* untuk mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari belanja 3 Klaster *Refocussing* APBD Kepri TA 2020 terhadap *Output*, Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Kesempatan Kerja (orang).

Misalkan dilihat dari andil terhadap *output*, maka nilai output paling besar disumbangkan dari klaster prioritas Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar 0,06 % disusul klaster Kesehatan 0,03% dan **klaster UMKM 0,00011%**. Jika dari segi NTB, maka rasio penciptaan NTB paling besar disumbangkan dari Klaster Kesehatan sebesar 0,827 per seribu rupiah, disusul Klaster UMKM sebesar 0,824 per seribu rupiah dan Klaster JPS sebesar 0,775 per seribu rupiah. Sedangkan dari segi dampak terhadap kesempatan kerja, maka andil terbesar dari Klaster Kesehatan sebesar 0,26%, disusul dengan Klaster JPS sebesar 0,21% dan **Klaster UMKM 0,0004%**. Maka apabila analisis dampak dilihat secara agregat, belanja *refocusing* sektor UMKM memberikan andil yang paling kecil relatif dibandingkan dampak dari alokasi terhadap dua klaster lainnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa alokasi anggaran yang diberikan kepada Klaster UMKM merupakan yang paling kecil.

Catatan :

Klaster UMKM = Prioritas Penanganan Dampak Ekonomi.

Sumber : *Kajian Fiskal Regional Kepri (diolah), 2020.*



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

manufaktur memberikan andil paling besar terhadap pembentukan PDRB Kepri dengan nilai mencapai 41,65 persen dan merupakan satu-satunya sektor yang memberikan andil di atas 1% terhadap PDRB, dimana sektor-sektor yang lain umumnya jatuh ke nilai 0 bahkan minus. Pada pertumbuhan Q1 Tahun 2021, sektor manufaktur pula memberikan andil sebesar 41,97% terhadap PDRB Kepri.

Dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur, pemerintah daerah perlu melakukan:

1. Mendorong dan mengembangkan pelaku usaha yang telah ada saat ini melalui fasilitasi peningkatan daya saing ekspor;
2. Menghilangkan regulasi lokal yang menghambat investasi dan upaya ekspansi bisnis;
3. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas daya saing input, khususnya melalui perbaikan infrastruktur pendukung lokal (logistik dan konektivitas).

Sektor pariwisata juga tidak kalah pentingnya bagi perkembangan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, terutama melalui sektor wisata bahari yang hampir tersedia di semua daerah kabupaten/kota di Kepri dengan karakter tersendiri. Sektor pariwisata sangat terpukul dengan pandemic ditandai berhentinya mobilitas perjalanan wisatawan ke Kepri, rendahnya tingkat okupansi hotel dan lumpuhnya sektor-sektor jasa sebagai faktor pendukung daya saing pariwisata di Kepri. Baik pemerintah pusat maupun daerah dapat berkolaborasi untuk memulihkan sektor pariwisata, terutama pengembangan destinasi tujuan wisata. Pengembangan pariwisata prioritas dilakukan melalui peningkatan pada aspek 4A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (peningkatan promosi dan peningkatan partisipasi pelaku usaha swasta).



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi telah diatur menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Provinsi berwenang dalam hal:

1. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi
2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi
3. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi
4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
5. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi
6. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.

Sektor lain yang juga sangat terpuak di Kepri adalah Sektor UMKM. Terdapat lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan:

- 1) Skema program pertama untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin dan kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, kelompok miskin perkotaan/desa, kelompok miskin baru, ODHA, dan lain-lain) dari dampak COVID-19. Pemerintah harus memastikan para pelaku UMKM ini masuk sebagai bagian dari penerima bantuan sosial (bansos), baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa maupun pembebasan pengurangan tarif listrik, dan kartu pekerja. Terdapat lapisan masyarakat “miskin baru” yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Mereka adalah lapisan masyarakat yang sering terlupakan dan tidak tercakup dalam berbagai jaring pengaman sosial. Perlu perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

untuk mengidentifikasi kelompok penerima manfaat miskin baru tersebut.

- 2) Skema kedua berupa insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dengan menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan dimulai dari April hingga September 2020.
- 3) Skema program ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program. Baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro (UMI) dan Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang saat ini berjumlah 6,4 juta nasabah dan di pegadaian yang tercatat ada 10,6 juta debitur. Penundaan angsuran dan subsidi bunga juga akan diberikan kepada usaha mikro, penerima kredit dari lembaga pengelola dana bergulir (LPDP) serta para penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Program penundaan angsuran dan subsidi bunga juga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah.
- 4) Skema program keempat adalah mengenai perluasan pembiayaan bagi UMKM, berupa stimulus bantuan modal kerja. Program bantuan modal kerja ini harus dirancang agar UMKM merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini. Terdapat sekitar 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Masih terdapat sekitar 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan dan diperlukan upaya masif untuk perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi UMKM yang bankable atau dinilai bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan, penyaluran kreditnya akan melalui perluasan program kredit usaha rakyat (KUR) sehingga dapat memperluas inklusi keuangan.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Sedang bagi UMKM yang tidak bankable, maka penyalurannya bisa melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), PNM Mekaar atau skema program lainnya.

- 5) Skema program kelima adalah kementerian atau lembaga, BUMN dan pemerintah daerah harus menjadi penyangga dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal pemulihan. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker bagi hasil produksi para pelaku UMKM, baik ini di bidang pertanian, perikanan, kuliner sampai industri rumah tangga. Selain itu juga, realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM sehingga bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini.

5.5 Evaluasi dan Rekomendasi Strategi Pemulihan

Berikut ini digambarkan perumusan strategi yang didasarkan pada mekanisme alur fikir sistematis dengan mempertimbangkan permasalahan pada sektor atau bidang yang terdampak, perkembangan terakhir serta respon kebijakan eksisting, implikasi dan pilihan-pilihan strategi. Secara garis besar, mekanisme perumusan strategi pemulihan sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan dengan:

1. Merespons implikasi dari kebijakan *eksisting* dalam penanganan sektor-sektor yang terdampak;
2. Mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan relevansi kebijakan *eksisting* dalam mengatasi permasalahan; dan
3. Mempertimbangkan kelanjutan strategi kebijakan atau memformulasi strategi yang baru.

Lebih lanjut, bahasan ini diuraikan dalam tabel berikut.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Tabel V-9
Identifikasi Sektor Terdampak dan Strategi Pemulihan

No	Sektor/Bidang	Program/Kegiatan Sektoral Yang Telah Dilakukan (OPD)	Kondisi Eksisting		Indikasi Pemulihan	Strategi
			Jan'20-Des'20	Jan'21-Juli'21		
1	Pariwisata - Perhotelan - Travel - Transportasi - Destinasi Wisata - Spa - Asosiasi Karnival Indonesia - Restoran	Tahun 2020, melalui Dinas Pariwisata dilaksanakan: ☐ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif ☐ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ☐ Program Pengembangan industry Pariwisata ☐ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ☐ Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Tahun 2021, melalui Dinas Pariwisata dilakukan: ☐ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ☐ Program Pemasaran Pariwisata ☐ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penurunan tingkat kunjungan wisman sebesar -85,64% selama periode Jan-Des 2020 (yoy), terjadi di 4 pintu masuk Kepri seperti Bintan, Karimun, Batam dan Tanjungpinang. Tingkat hunian kamar Hotel turun sebanyak 29,26 poin dari 56,67% menjadi 27,41% pada periode yang sama.	Tren penurunan kunjungan wisman masih berlanjut: ☐ Jan-Mei 2019 - Jan-Mei 2020 turun (-64,74%); ☐ Jan-Mei 2020 - Jan-Mei 2021 turun (-99,66%). Tingkat penurunan ini masih lebih besar dari persentase penurunan akumulatif Jan-Des 2020 (yoy) pada tingkat (-85,64%).	Belum Tercapai.	- Mempercepat penyelesaian Vaksinasi khususnya bagi Pekerja Sektor Pariwisata. - Menyegerakan pelaksanaan Travel Buble. - Mendorong kelanjutan relaksasi pajak bagi sektor pariwisata; - Mengupayakan insentif bagi pekerja pariwisata. - Mengupayakan insentif bagi UMKM sektor pariwisata. - Mendorong kelanjutan program stimulus



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

		☐ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam penanganan COVID-19, Dinas Pariwisata mendapat penugasan dalam Prioritas Kesehatan, dengan kegiatan: ☐ Operasional Penanganan Corona Virus Disease 2019, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. Rp1,420,802,650.00, terdiri dari : • Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan, Pembagian Masker serta tracking terkait dengan Covid-19 (230 wilayah) • Pembentukan SMA Tangguh (1 Sekolah) • Pembentukan Kampung Siaga (1 Kampung)				ekonomi kepada sektor pariwisata.
2	Koperasi dan UMKM	Tahun 2020, Melalui Dinas Koperasi Dan Umkm, Dilakukan: ☐ Program Penguatan Kelembagaan Koperasi ☐ Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan ☐ Program Peningkatan Daya Saing UKM Dan Koperasi	☐ Sebanyak 1.444 UKM dari 106.290 di Kepri terdampak COVID-19 (Satgas COVID Kepri, 2021). ☐ Survey BPS Kepri: menemukan dampak COVID pada UMKM: pengurangan kapasitas, berhenti operasi, beroperasi dgn WFH. ☐ Pendapatan pada UMKM dilaporkan menurun, lalu sebagian kecil	Belum tercapai.	• Mengupayakan insentif bagi pelaku UMKM; • Bantuan permodalan; • Penyerapan produk UMKM; • Penglibatan sektor UMKM dalam program padat karya;	



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

		Tahun 2021, Melalui Dinas Koperasi Dan Umkm Dilakukan: ☐ Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian ☐ Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ☐ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) ☐ Program Pengembangan Umkm Dalam Program Penanganan COVID-19, Dinas Koperasi dan UMKM tidak termasuk di antara OPD yang mendapat penugasan baik dalam klaster prioritas penanganan kesehatan, klaster prioritas jaring pengaman sosial maupun klaster prioritas penanganan dampak ekonomi.	mengalami pendapatan yang tetap, dan hanya sedikit mengalami peningkatan pendapatan.		• Kemitraan sektor UMKM dengan industri; • Digitalisasi sektor UMKM.
3	Pendidikan	Dalam Program Penanganan COVID-19, Dinas Pendidikan mendapat penugasan dalam Klaster Prioritas Kesehatan dengan kegiatan berupa Fasilitasi Pelaksanaan UTBK-SBMPTN Dampak Covid-19 di Kota Batam, dan Prioritas Perlindungan Sosial (JPS) dalam bentuk kegiatan	Pembelajaran Daring	Pembelajaran Daring	Belum tercapai. • Kelanjutan bantuan pembayaran SPP; • Percepatan Vaksinasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan; • Mendorong skema hybrid dalam proses belajar mengajar dengan penerapan prokes.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan/Pendampingan Pelaksanaan Penanganan Dampak Covid-19 Pada Kegiatan Belajar dengan melakukan Pendataan dan pendampingan Sekolah/Tempat Pendidikan Menengah Terkait Keringanan Pendanaan Pendidikan yang Terdampak Covid- 19 Pada Kegiatan Belajar mengajar di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Prioritas Perlindungan Sosial lainnya, OPD BPKAD mendapat penugasan yang berkaitan dengan sektor Pendidikan yaitu Bantuan Sosial Pembebasan/Keringanan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Peserta Didik SMA, SMK, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Yang Terdampak Covid-19 (21,64 Milyar).				
4	Kesejahteraan Sosial	Secara khusus, program penanganan COVID-19 tidak melibatkan OPD Dinas Sosial dalam keseluruhan Prioritas Penanganan COVID-19 baik Kesehatan, Perlindungan Sosial	☐ Persentase Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 6,13 persen atau sebanyak 142,61 ribu jiwa,	☐ Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2021 sebesar 6,12 persen atau sebanyak 144.46 ribu jiwa, menurun 0,01	Belum Tercapai.	• Mengupayakan kelanjutan Program social safety net; • Mengupayakan optimalisasi penggunaan data DTKS (SIKS-NG)



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

		maupun Prioritas Dampak Ekonomi. Kemudian dalam Prioritas Perlindungan Sosial, BPKAD juga mengucurkan <i>Bantuan Sosial Tidak Terencana Terdampak Covid-19</i> sebesar Rp. 916 juta. Di antaranya kepada 35 orang Kategori Miskin atau Rentan Miskin Di Provinsi Kepulauan Riau kepada Pasien Positif Covid-19 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Meninggal Dunia, dan kepada sebanyak 14 orang Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau (IPMKR) Kairo Mesir dengan Kegiatan Biaya Transportasi Kepulauan Mahasiswa Kepulauan Riau Di Mesir Dalam Kondisi Wabah COVID-19.	meningkat 0,21 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen atau bertambah sebanyak 10.64 ribu orang dan meningkat 0,33 persen poin dibanding September 2019 yang sebesar 5,80 persen atau bertambah sebanyak 14.85 orang.	persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 6,13 persen atau bertambah sebanyak 1.85 ribu jiwa dan meningkat 0,20 persen poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen atau bertambah sebanyak 12.49 ribu jiwa.	• Mendorong partisipasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kemasyarakatan
5	Ketenagakerjaan	Dalam Penanganan COVID-19, Dinas Tenaga Kerja dilibatkan dalam Prioritas Kesehatan yaitu dalam bentuk kegiatan <i>Operasional Tim Satuan Tugas Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Akibat Terjadinya Pandemi Covid-19</i>	□Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2020 sebesar 10,34 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,84 persen poin dibandingkan	□ Mengalami perbaikan dari 10,34% pada periode Agustus 2020 menjadi 10,12% pada periode Februari 2021, namun tingkat tersebut malah diklaim	• Mendorong pembukaan lapangan kerja baru; • Mendorong kebijakan pro-investasi.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

		dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 78,5 juta. Selain itu, dalam Prioritas Penanganan COVID-19, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), telah dikucurkan pula <i>Bantuan Sosial Tidak Terencana Terdampak Ekonomi Akibat Covid-19</i> senilai Rp. 290 juta, yaitu kepada sebanyak 106 orang Pelaku IKM Terdampak Covid-19 (Pengusaha Jahit Rumahan).	dengan Agustus 2019. □ Terdapat 288.549 orang (16,87 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (42.210 orang), BAK karena Covid-19 (8.587 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (12.568 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (225.184 orang).	sebagai tingkat pengangguran tertinggi di antara daerah provinsi lainnya di Indonesia. Pada saat yang sama, tingkat rata-rata nasional pengangguran berada pada angka sebesar 7,07%. Terdapat 142.593 orang (8,20 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (26.405 orang), BAK karena Covid-19 (8.190 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (9.216 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (98.782 orang).		
--	--	--	---	--	--	--



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

BAB VI P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak negatif terhadap hampir keseluruhan sektor-sektor ekonomi maupun sosial di Provinsi Kepulauan Riau berupa penurunan kinerja secara absolut baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan.
2. Sektor-sektor yang mengalami penurunan kinerja tersebut di antaranya:
 - a. Sektor-Sektor dalam Pembentukan Produksi PDRB Tahun 2020, dengan tingkat keterpaparan:
 1. Keterpaparan Tinggi, yaitu: Sektor Jasa Lainnya dengan penurunan minus 68,83%, Sektor Jasa perusahaan minus 41,88%, Sektor Akomodasi Makan dan Minum minus 41,01%, Sektor Transportasi dan Pergudangan minus 40,23%;
 2. Keterpaparan Sedang, yaitu: Sektor Perdagangan Besar&Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor minus 12,72%, Sektor Real Estate minus 8,33%, Jasa Pendidikan minus 8,20% dan Konstruksi minus 6,40%.
 3. Keterpaparan Rendah, yaitu: Sektor Pertanian minus 4,39%, Pengadaan Listrik dan Gas minus 4,38%, Pertambangan dan Penggalan minus 4,17, Keuangan dan Asuransi minus 3,10%, Pengadaan Air dan



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

Pengelolaan Sampah/Limbah minus 2,78% dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial minus 2,05%.

- b. Sedangkan Sektor-Sektor dalam Pembentukan PDRB dari segi Pengeluaran hampir semua mengalami penurunan, kecuali Konsumsi Rumah Tangga yang positif 0,53. Selain itu, sektor yang paling mengalami penurunan pertumbuhan Perubahan Inventori sebesar minus 94,46%, disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) sebesar minus 5,08%, Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar minus 4,67%, Konsumsi Pemerintah minus 3,19%, Ekspor minus 2,44% dan Impor minus 1,77%.
- c. Sektor-Sektor Lain yang Strategis di antaranya turut mengalami penurunan kinerja yang drastis yaitu Sektor UMKM dan Sektor Pariwisata.
 1. Sektor UMKM dimana sebagian besar pelakunya mengalami pengurangan kapasitas, penghentian operasi, beroperasi dgn WFH dan penurunan pendapatan.
 2. Sektor Pariwisata mengalami Penurunan tingkat kunjungan wisman sebesar -85,64% selama periode Jan-Des 2020 (yoy), penurunan Tingkat hunian kamar Hotel sebanyak 29,26 poin dari 56,67% menjadi 27,41% pada periode yang sama. Tren penurunan kunjungan wisman terus berlanjut pada periode Jan-Mei 2021 turun (-99,66%).
3. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak negatif terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dengan merosotnya kesejahteraan masyarakat akibat



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

bertambahnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

4. Pemberlakuan pembatasan sosial sejak meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 telah menyebabkan dampak negatif terhadap sektor pendidikan akibat terhentinya pembelajaran tatap muka yang berkepanjangan. Dampak kentara yang paling dirasakan oleh sektor pendidikan adalah *learning loss* (penurunan kemampuan siswa), kerugian sumber daya manusia dan kehilangan peluang ekonomi dalam jangka panjang. Dampak lain yang dirasakan adalah terjadinya ketimpangan akses infrastruktur maupun sumber daya terutama oleh kalangan peserta didik di kawasan-kawasan pedesaan atau pesisir yang tidak tersentuh pembangunan secara merata.
5. Pelaksanaan program penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pandemi COVID-19 maupun upaya pemulihan sektor ekonomi dan sosial.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki dan mengembangkan *baseline* skenario penanganan pandemi yang dipersiapkan berdasarkan perkembangan situasi pandemik yang terjadi di daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan di antara Skenario Transmisi, Skenario Transisi dan Skenario Keterpaparan.
- 2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mendorong dan memastikan kemampuan efektif dan responsif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri untuk melakukan penilaian resiko dan dampak pandemik



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi ranah masing-masing OPD.

- 3) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendayagunakan peran Satgas COVID-19 khususnya desk kelitbangan yang ada untuk mengoptimalkan perencanaan, data, kepakaran dan analisis yang terintegrasi dengan perumusan kebijakan dalam penanganan pandemik COVID-19.
- 4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengefektifkan penglibatan OPD-OPD yang secara sektoral berkaitan langsung dengan prioritas penanganan pandemik yang terdiri dari Prioritas Kesehatan, Prioritas Perlindungan Sosial (*social safety net*), dan Prioritas Penanganan Dampak Ekonomi.
- 5) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penanganan pandemik antar kabupaten/kota berjalan secara terintegrasi dan terkoordinir melalui efektivitas Satgas COVID-19 Provinsi dan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota.
- 6) Untuk pemulihan sektor pariwisata, langkah-langkah strategis yang relevan untuk dilakukan diantaranya:
 - ☐ Mempercepat penyelesaian Vaksinasi khususnya bagi Pekerja Sektor Pariwisata.
 - ☐ Mendorong kelanjutan relaksasi pajak bagi sektor pariwisata;
 - ☐ Mengupayakan insentif bagi pekerja pariwisata.
 - ☐ Mengupayakan insentif bagi UMKM sektor pariwisata.
 - ☐ Mendorong program stimulus ekonomi kepada sektor pariwisata.
 - ☐ Mempertimbangkan pelaksanaan *Travel Buble* dengan tetap memperhatikan standar protokol yang ketat.
- 7) Untuk pemulihan sektor UMKM, langkah-langkah strategis yang relevan untuk dilakukan diantaranya:



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- ☐ Mengupayakan insentif bagi pelaku UMKM;
 - ☐ Bantuan permodalan;
 - ☐ Penyerapan produk UMKM;
 - ☐ Penglibatan sektor UMKM dalam program padat karya;
 - ☐ Kemitraan sektor UMKM dengan industri;
 - ☐ Digitalisasi sektor UMKM.
- 8) Untuk mendukung Sektor Pendidikan, langkah-langkah yang perlu dilakukan di antaranya:
- ☐ Percepatan Vaksinasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - ☐ Mendorong skema hybrid dalam proses belajar mengajar dengan penerapan prokes.
 - ☐ Mempertimbangkan Kelanjutan program bantuan pembayaran SPP bagi *Peserta Didik SMA, SMK, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Yang Terdampak Covid-19*
 - ☐ Mendorong keringanan pembayaran SPP bagi sekolah-sekolah swasta dengan prinsip berbagi resiko dan biaya (*risk and cost sharing*) mengingat di masa pandemik banyak orang tua/wali murid yang terdampak oleh pandemi.
 - ☐ Program bantuan lainnya yang dapat meringankan beban orang tua/wali murid.
- 9) Dalam mitigasi bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi Kepri perlu melakukan:
- ☐ Mengupayakan kelanjutan Program *social safety net*.
 - ☐ Optimalisasi dan pemutakhiran data DTKS (SIKS-NG).
 - ☐ Mengefektifkan penglibatan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung Program *Social Safety Net*.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123–131.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19–24.
- Baldwin, R. (2020). The Greater Trade Collapse of 2020: Learnings from the 2008–09 Great Trade Collapse. *VoxEU. Org.* URL <https://Voxeu.Org/Article/Greater-Trade-Collapse-2020>.
- Baldwin, R., & Mauro, B. W. di. (2020). *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever* (a VoxEU.or).
- Bloom, E., De Wit, V., & Carangal-San Jose, M. J. (2005). Potential economic impact of an avian flu pandemic on Asia.
- Budiyanti, E. (2020). Dampak virus corona terhadap sektor perdagangan dan pariwisata Indonesia. *Info Singkat XII*,(4).
- Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020). *Mengukur dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia 2020*. CSIS Indonesia.
- Degye, G., Ferede, T., Diriba, G., & Ketema, M. (2020). *Economic and Welfare Effects of COVID-19 and Responses in Ethiopia: Initial insights. Policy Working Paper 02/2020*.
- Fakhruddin, B. S. H. M., Blanchard, K., & Ragupathy, D. (2020). Are we there yet? The transition from response to recovery for the COVID-19 pandemic. *Progress in Disaster Science*, 7, 100102.
- Haralambie, G. (2011). The Global Crisis and Cyclical Theory. *Theoretical & Applied Economics*, 18(11).
- Hur, S., & Jenuwine, M. (2020). Lessons on the Economics of Pandemics from Recent Research. *Economic Commentary*, (2020–11).
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. *SSRN Electronic Journal*, (March), 1–43. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729>
- McKibbin, W. J., & Sidorenko, A. (2006). *Global macroeconomic consequences of*



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

- pandemic influenza*. Lowy Institute for International Policy Sydney, Australia.
- Meltzer, M. I., Cox, N. J., & Fukuda, K. (1999). The economic impact of pandemic influenza in the United States: priorities for intervention. *Emerging Infectious Diseases*, 5(5), 659.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59–64.
- Sakri, D. (2020). Menakar Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, 10. Retrieved from <https://csis.or.id/publications/menakar-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-daerah>
- Schoenbaum, S. C. (1987). Economic impact of influenza: the individual's perspective. *The American Journal of Medicine*, 82(6), 26–30.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147–153.

Bahan Bacaan :

1. Presentasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas “Dampak Covid-19 terhadap Pembangunan dan Respons Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”, 2020.
2. Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2020.
3. Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, 2021.
4. Survey Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Oktober 2020.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

5. Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Kepri Tahun 2020, Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI

LAMPIRAN: Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Provinsi Kepulauan Riau

NO	OPD	ANGGARAN
1	2	3
I	PRIORITAS PENANGANAN KESEHATAN	83,858,275,612.00
1	DINAS KESEHATAN	15,752,732,090.00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB	32,776,800,453.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENGKU HAJI DAUD	9,472,950,000.00
4	DINAS PERHUBUNGAN	1,112,911,954.00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,565,807,500.00
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,142,841,985.00
7	INSPEKTORAT DAERAH	2,100,000,000.00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	545,100,000.00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,102,351,480.00
10	BIRO HUKUM	587,477,500.00
11	DINAS PARIWISATA	1,420,802,650.00
12	DINAS PENDIDIKAN	200,000,000.00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	78,500,000.00
II	PRIORITAS PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	290,497,000.00
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	290,497,000.00
III	PRIORITAS PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL/SOCIAL SAFETY NET	145,941,181,775.00
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27,964,716,825.00
2	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	117,256,464,950.00
3	DINAS PENDIDIKAN	720,000,000.00
TOTAL		230,089,954,387.00



KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR-SEKTOR TERDAMPAK COVID-19 DI KEPRI
